

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH,
INVESTASI SWASTA DAN ANGKATAN KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
TAHUN 1982-2003
(Studi Kasus di Kota Semarang)**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Adi Raharjo
C4B003118

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**Juni
2006**

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH,
INVESTASI SWASTA DAN ANGKATAN KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus di Kota Semarang)

Oleh
Adi Raharjo
C4B003118

telah disetujui
oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. DR. Miyasto, SU
Tanggal

Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP
Tanggal

ABSTRACT

The economic growth is still the main purpose and crucial indicator in the success of regional economic development. Semarang as the capital province of central java has fluctuating economic growth. This condition is still lower compared with other big cities in java and it affects to people income per capita. The aims of this research is to figure out the progress of regional government expenditure of allocation and to examine its effect upon economic growth in Semarang. In examining the effect of government expenditure, the analysis is conducted together with related variables, such as private investment and labour force.

In this study, the theory of regional economic growth is applied Solow-Swan which is based on Cobb Douglas production function with the consideration of its capability to show the relationship between the result of production and the combination of production factor that is used

The data which used is the data of PDRB and the number of labour force issued by BPS of Semarang; the data of government expenditure (routine and development) based on the calculation of regional budget of Semarang and the data of private investment from BKPM-PBA of Semarang since 1982-2003 (time series). The regression analysis which is used is Ordinary Least Square (OLS) and supporting software from SPSS 11.5.

The result of the study shows that the variable of Government expenditure (routine) and private investment are affect positively and significantly upon regional economic growth on α 10 % but the variable of Government expenditure (development) and labour force are affect positively but not significantly

Finally the role of regional government through government expenditure which is able to stimulate the increasing variable of private investment and the opportunity of labour force which is expected to increase the regional economic activities in order to reach the economic growth and people income per capita

Key words : economic growth, government expenditure, private investment, labour force.

ABSTRAKSI

Pertumbuhan ekonomi masih merupakan tujuan utama dan indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Kota Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif dan masih rendah dibandingkan kota-kota besar lainnya di Jawa yang berakibat pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengalokasian pengeluaran pemerintah daerah serta mengkaji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Semarang. Dalam mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah analisis dilakukan bersama dengan variabel terkait lain yaitu Investasi Swasta dan Tenaga Kerja.

Pada penelitian ini digunakan teori pertumbuhan ekonomi regional Solow-Swan yang didasarkan pada fungsi produksi Cobb Douglas dengan pertimbangan kemampuannya untuk menunjukkan hubungan perimbangan antara hasil produksi dan kombinasi faktor produksi yang digunakan.

Data yang digunakan adalah Data PDRB perkapita dan jumlah angkatan kerja yang diterbitkan oleh BPS Kota Semarang; Data Pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) berdasarkan perhitungan APBD Kota Semarang serta data investasi swasta dari BKPM PBA Kota Semarang mulai tahun 1982-2003 (time series). Analisis regresi yang digunakan adalah OLS dengan bantuan perangkat lunak SPSS 11.5

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah (rutin) dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah α 10 % akan tetapi variabel pengeluaran pemerintah (pembangunan) dan angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan

Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi swasta dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran pemerintah, Investasi swasta, Angkatan kerja

III	METODE PENELITIAN	60
3.1	Jenis dan Sumber Data	60
3.2	Metode Pengumpulan Data	61
3.3	Teknik Analisis	61
3.3.1	Konversi Tahun Dasar PDRB	64
3.3.2	Uji Model	65
3.3.3	Metode Perhitungan terhadap Pengeluaran Pemerintah	72
3.4	Definisi Operasional Variabel	72
IV.	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	74
4.1	Letak Geografis	74
4.2	Luas dan Pembagian Wilayah	75
4.3	Perkembangan PDRB Kota Semarang	77
4.3.1	Perkembangan PDRB atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	77
4.4	Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Semarang	79
4.5	Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah	79
4.6	Perkembangan Penduduk dan Tenaga Kerja Kota Semarang	86
4.6.1	Perkembangan Penduduk Kota Semarang	86
4.6.2	Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Semarang	87
4.7	Perkembangan Investasi Swasta di Kota Semarang	89
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	92
5.1	Hasil Pengujian Regresi	92
5.1.1	Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik	93
5.1.1.1	Pengujian Multikolinearitas	93
5.1.1.2	Pengujian Heterokedastisitas	94
5.1.1.3	Pengujian Autokorelasi	96
5.1.1.4	Pengujian Normalitas	97
5.1.2	Pengujian Statistik	97
5.1.2.1	Uji Hipotesis	98
5.1.2.2	Uji Hipotesis Simultan	100
5.1.2.3	Koefisien Determinasi	100
5.1.2.4	Pengujian Hipotesis	99
VI.	PENUTUP	103
6.1	Kesimpulan	103
6.2	Saran	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Djojohadikusumo (1993) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi.

Menurut Schumpeter dalam Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan *output* dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh

mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Surabaya dapat dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Semarang, DKI Jakarta, Surabaya berdasarkan PDRB per Kapita
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Periode 1995-2003
(Dalam Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Semarang	PDRB DKI Jakarta	PDRB Surabaya	Pertumbuhan Ekonomi Semarang
1995	4.682.001	60.648.689	13.335.639,26	-
1996	5.279.973	66.201.775	14.855.897,48	12,7
1997	5.793.805	69.543.445	15.724.321,44	9,7
1998	4.737.995	57.380.516	15.429.196,46	-18,2
1999	4.899.241	57.215.223	13.036.491,09	3,4
2000	5.142.532	59.694.418	13.455.465,85	4,9
2001	5.405.239	61.868.256	14.028.424,46	5,1
2002	5.626.854	64.338.830	14.565.521,28	4,1
2003	5.875.871	67.314.201	15.252.429,44	4,4
	Rata-rata			3.26

Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)

Dari Tabel 1.1 dapat di simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Semarang yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan 1993, mengalami tingkat fluktuasi. Dampak krisis sejak pertengahan 1997 berimplikasi terhadap perekonomian kota Semarang dengan menurunnya angka laju pertumbuhan ekonomi dari 12,8 % pada tahun

1996; 9,7 % pada tahun 1997 dan puncaknya -18,2 % pada tahun 1998. Sedangkan pada tahun 1999- 2003 angka laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 3,28 %. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tergolong tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan Surabaya, namun masih belum mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduknya yang diperoleh dari pembagian angka PDRB dengan penduduk Kota Semarang. Hal ini menandakan masih rendahnya upaya pemerintah Kota Semarang dalam hal pemberantasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi (BPS Kota Semarang, 2003)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah

dalam mengelola kawasannya termasuk kebijakan-kebijakan pembiayaan. Konsekuensi logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu sudah menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Menurut Todaro (1999 : 124-130) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) meliputi semua jenis investasi baru baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang ditanamkan dengan bentuk tanah, peralatan fisik, dan modal sumber daya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar *output* atau pendapatan di kemudian hari.

Akumulasi modal yang dilakukan oleh pemerintah menggambarkan seberapa besar peran pemerintah dalam sistem perekonomian suatu daerah. Samuelson dan Nordhaus (1996:49-50) menyebutkan bahwa perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang menerapkan mekanisme pasar, artinya bahwa jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi wewenang pasar karena hanya mekanisme pasar yang mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Namun dalam hal-hal tertentu menunjukkan bahwa mekanisme pasar memiliki kelemahan yaitu gagal mencapai alokasi yang efisien disebabkan oleh adanya

common goods, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik, eksternalitas, *incomplete market*, kegagalan informasi, *unemployment* dan *uncertainty*.

Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam perekonomian agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien.

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak diperdebatkan mengenai seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntungan yang diperoleh dari program yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selama ini sangat bergantung kepada jasa yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan peranan yang positif dari modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi (Aschauer, 1999).

Todaro (1997:18) menyebutkan pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Menurut Jones (1976:14) bahwa infrastruktur (*social overhead capital*) seperti jalan, jembatan dan pelabuhan walaupun tidak memberikan kontribusi secara langsung pada produksi output, tetapi infrastruktur memberikan peranan yang esensial dalam aktivitas ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan di daerah selanjutnya akan lebih memilih mengadopsi kebijakan

pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi daerah itu sendiri, tentunya tuntutan pengenalan potensi daerah dapat dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan daerahnya.

Menurut Mangkoesoebroto (1998) Peranan pemerintah yang harus dijalankan adalah :

1. Peranan alokasi yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat memproduksinya.
2. Peranan distribusi yaitu pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi yang mampu dan meredistribusikan bagi yang kurang mampu.
3. Peranan stabilisasi yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan.

Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah menuntut adanya suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah. Upaya-upaya

peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan pada kondisi dan item tertentu saja, karena secara umum upaya tersebut justru dapat meningkatkan beban yang harus ditanggung masyarakat.

Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pembangunan karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya.

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja rutin dan belanja pembangunan Pemerintah Kota Semarang dari tahun 1982 s/d 2003 dapat dilihat dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Semarang Tahun 1982 s.d 2003
(Dalam Juta Rupiah)

No	Tahun	Belanja Rutin		Belanja Pembangunan	
1	1982	285.816	-	177.129	-
2	1983	303.089	6,04 %	189.221	6,83 %
3	1984	353.014	16,47 %	216.134	14,22 %
4	1985	366.995	3,96 %	611.013	182,70 %
5	1986	489.732	33,44 %	485.471	-20,55 %
6	1987	551.173	12,55 %	850.810	75,25 %
7	1988	811.666	47,26 %	630.289	-25,92 %
8	1989	930.730	14,67 %	703.810	11,66 %
9	1990	3.646.158	291,75 %	850.844	20,89 %
10	1991	8.252.565	126,34 %	1.052.906	23,75 %
11	1992	10.173.478	23,28 %	1.269.196	20,54 %
12	1993	35.102.563	245,04 %	31.438.380	147,70 %
13	1994	42.792.556	21,91 %	38.640.828	22,91 %
14	1995	49.713.382	16,17 %	47.947.633	24,09 %
15	1996	58.891.346	18,46 %	53.364.698	11,30 %
16	1997	69.390.790	17,83 %	62.746.916	17,58 %
17	1998	36.012.430	-48,10 %	53.540.021	-14,67 %
18	1999	50.154.295	39,27 %	62.864.991	17,42 %
19	2000	50.067.102	-0,17 %	113.377.101	80,35 %
20	2001	74.194.065	48,19 %	115.323.294	1,72 %
21	2002	80.414.472	8,38 %	170.855.717	48,15 %
22	2003	132.803.974.	65,15 %	271.000.168	58,61 %
	Rata-rata		47,99 %		34,50 %

Sumber : BPS Kota Semarang (di olah)

Berdasarkan Tabel 1.2 di tunjukkan bahwa perkembangan belanja rutin dari tahun 1982 s/d 2003 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 47,99 % dari Rp. 285.816.341 pada tahun 1982 menjadi Rp. 132.803.974.200 pada tahun 2002/2003. Sedangkan perkembangan belanja pembangunan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 34,50 % dari Rp. 177.129.200 tahun 1982 menjadi Rp. 27.100.016.800 pada tahun 2002/2003. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata

pengeluaran pembangunan Kota Semarang yang digunakan untuk investasi guna mencapai sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan ternyata lebih kecil dibandingkan pengeluaran rutin yang digunakan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan yang bersifat operasional dan peningkatan jangkauan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Selain investasi pemerintah, variabel lain yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal swasta yang secara akumulatif memiliki nilai investasi dan output/produksi yang lebih besar dan selanjutnya dapat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat. Kondisi perkembangan investasi swasta di kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Investasi Penanaman Modal Yang Telah Mendapat SPT
di Kota Semarang Tahun 1982 s.d 2003
(dalam juta rupiah)

No	Tahun	Investasi	Laju
1	1982	4.806.091	-
2	1983	5.021.477	4,48
3	1984	5.176.784	3,09
4	1985	19.187.022	270,64
5	1986	14.503.415	-24,41
6	1987	22.566.447	55,59
7	1988	16.741.725	-25,81
8	1989	27.389.895	63,60
9	1990	33.672.590	22,94
10	1991	37.618.808	11,72
11	1992	44.975.781	19,56
12	1993	90.488.625	101,19
13	1994	113.112.643	25,00
14	1995	125.637.925	11,07
15	1996	125.743.505	0,08
16	1997	128.320.900	2,05
17	1998	125.485.995	-2,21
18	1999	103.934.839	-17,17
19	2000	110.345.258	6,17
20	2001	116.586.578	5,66
21	2002	126.548.313	8,54
22	2003	145.697.734	15,13
		Rata-rata	26,52 %

Sumber : BKPM-PBA Kota Semarang (diolah).

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa perkembangan investasi swasta yang dilihat dari besarnya investasi penanaman modal yang telah mendapat SPT (Surat Persetujuan Tetap) di Kota Semarang pada tahun 1982 s/d 2003 rata-rata sebesar 26,52 %. Besarnya perkembangan investasi swasta ini dikarenakan besarnya penanaman modal pada tahun 2003, sehingga hal ini belum

dapat mencerminkan besaran yang sebenarnya dari penanaman modal mengingat selama kurun waktu 1999 s.d 2002 rata-rata pertumbuhan investasi swasta di kota Semarang hanya sebesar -17,17 %.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dihadapi oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhannya masih rendah. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi. Gambaran mengenai jumlah angkatan kerja di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Perbandingan Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja dan Belum Bekerja
Di Kota Semarang Tahun 1982 s.d 2003

No	Tahun	Angkatan Kerja	Yang Bekerja	Yang Belum Bekerja (Pengangguran)	Laju Bekerja
1	1982	157.625	70869	86.756	
2	1983	165.637	78423	87.214	10,66
3	1984	183.905	89678	94.227	14,35
4	1985	191.512	97191	94.321	8,38
5	1986	298.152	154925	143.227	59,40
6	1987	318.661	161415	157.246	4,19
7	1988	328.917	176620	152.297	9,42
8	1989	336.792	182551	154.241	3,36
9	1990	374.333	212006	162.327	16,14
10	1991	405.877	232631	173.246	9,73
11	1992	542.530	378976	163.554	62,91
12	1993	445.906	274642	171.264	624,70
13	1994	738.681	577434	161.247	-78,98
14	1995	747.093	582765	164.328	0,92
15	1996	759.307	588086	171.221	0,91
16	1997	774.549	601318	173.231	2,25
17	1998	834.550	649423	185.127	8,00
18	1999	930.095	743073	187.022	14,42
19	2000	746.791	555697	191.094	-25,22
20	2001	777.791	615426	162.365	10,75
21	2002	838.423	672925	165.498	9,34
22	2003	878.443	707115	171.328	5,08
Rata-rata					36,70

Sumber : BPS Kota Semarang

Dari Tabel 1.4 di tunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Semarang yang dapat diserap oleh pasar kerja sejak tahun 1982-1983 hanya sebesar 36,70 %. Hal ini menunjukkan belum terserapnya secara maksimal angkatan kerja yang ada di Kota Semarang dan potensi yang mungkin timbul dari besarnya tingkat perkembangan angkatan kerja yang belum bekerja adalah masalah keterbelakangan serta permasalahan sosial yang berakibat pada

lambatnya prospek pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah (BPS Kota Semarang, 2003)

Melihat fenomena dari Kota Semarang yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi berfluktuatif yang berakibat pada rendahnya pendapatan perkapita penduduknya, belum maksimalnya angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja dan jumlah investasi swasta yang dinilai belum optimal, maka kiranya perlu diteliti lebih mendalam tentang pengaruh yang timbul dari pengeluaran pemerintah dan hubungannya dengan investasi swasta, angkatan kerja serta implikasinya pada pertumbuhan ekonomi.

1.2 Perumusan Masalah

Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator untuk menilai keberhasilan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi saat ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian telah berdampak pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi kota Semarang berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 1993 untuk periode pengamatan tahun 1982 s.d 2003 ternyata menunjukkan tingkat fluktuatif (lihat Tabel 1.2). Berdasarkan pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 1993 pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kota Semarang dibandingkan dengan kota-kota besar lain di pulau Jawa ternyata lebih rendah.

Variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah antara lain akumulasi modal dalam hal ini besar kecilnya pengeluaran yang dilakukan oleh

pemerintah daerah dan investor swasta baik PMA maupun PMDN dalam menanamkan modal serta angkatan kerja yang dapat diserap dalam pasar kerja

Peranan pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi dimaksudkan agar dapat mempengaruhi jalannya perekonomian, dengan demikian dapat diusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan (Reksoprajitno, 1997:90).

Peranan pemerintah daerah di dalam kegiatan ekonomi tercermin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana variabel belanja pembangunan dapat diartikan sebagai besarnya investasi oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Berdasarkan data yang ada ternyata rata-rata belanja pembangunan Pemerintah Kota Semarang yang digunakan untuk investasi guna mencapai sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran rutinnya (lihat Tabel 1.3)

Variabel-variabel eksternal yang menunjang dan bersinergi secara bersama-sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah investasi swasta dan angkatan kerja. Keadaan yang ada di Kota Semarang ternyata menunjukkan masih kecilnya kontribusi dan kurang optimalnya kedua variabel ini dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. (lihat Tabel 1.4 dan 1.5)

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengeluaran belanja rutin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota.
2. Sejauhmana pengeluaran belanja pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota..
3. Sejauhmana investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota.
4. Sejauhmana angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota.

Penelitian tentang pengaruh yang timbul dari pengeluaran pemerintah daerah dan hubungannya dengan investasi swasta, angkatan kerja serta implikasinya pada pertumbuhan ekonomi akan mengambil unit analisis pemerintah Kota Semarang dengan periode pengamatan runtun waktu (*time series*) tahun 1983-2003.

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengukur dan menganalisis besarnya pengaruh belanja pembangunan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kota.
2. Mengukur dan menganalisis besarnya pengaruh belanja rutin pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kota.

3. Mengukur dan menganalisis besarnya pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi kota.
4. Mengukur dan menganalisis besarnya pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kota.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari investasi pemerintah dan hubungannya dengan investasi swasta, angkatan kerja serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Telaah Pustaka

2. 1. 1 Peranan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa pertanyaan yang sering di diskusikan mengenai peranan sektor publik dalam perekonomian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan mengapa peranan sektor publik diperlukan dan apa peranan sektor publik dalam sistem perekonomian. Menurut Musgrave (1989) ada beberapa premis yang diterima secara umum dalam masyarakat bahwa 1) komposisi *output* yang ada seharusnya berada dalam garis yang sesuai dengan preferensi konsumsi individu dalam masyarakat, dan bahwa 2) preferensi tersebut digunakan untuk di desentralisasikan dalam membuat keputusan mengapa seluruh perekonomian tidak dipegang oleh swasta.

Sebuah perekonomian ideal, yang kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumberdaya berasal dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Kenyataan yang ada, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal. Perekonomian pasar seringkali terlilit polusi dan monopoli seiring dengan melonjaknya inflasi atau pengangguran dan pada prakteknya pula bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat *Laissez-faire* sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pemerintah mengambil peranan penting dalam perekonomian.

Menurut Adam Smith dalam Mangkoesubroto (1998), mengemukakan bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis seakan-akan diatur oleh *invisible hand*. Karena itu perekonomian dapat berkembang maksimum. Sehingga Adam Smith mengatakan bahwa peran pemerintah hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta, yaitu melaksanakan peradilan, pertahanan/keamanan, dan pekerjaan umum.

Sedangkan menurut Samuelson (1997) secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan dan melaksanakan kebijakan stabilisasi

Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Jones (1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung diantaranya adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tak langsung diantaranya berhubungan dengan masalah

tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta nilai tukar.

Menurut Hyman dkk (1996); dalam sistem ekonomi negara campuran (mixed economy) pemerintah hanya menyediakan jumlah barang dan jasa tertentu (publik good) yang tidak dapat disediakan oleh swasta serta mengatur alokasi perorangan.

Menurut Mangkoesubroto (1998) Barang publik adalah beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorangpun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Barang publik mempunyai ciri-ciri : 1) tidak bersaing (non rival in consumption) yaitu konsumsi dari seseorang tidak menyebabkan menurunnya kemanfaatan oleh individu lainnya; 2) tidak dapat dikecualikan (non excludability), artinya tidak seorangpun konsumen dapat dilarang dalam memanfaatkannya. Barang dan jasa yang diproduksi pemerintah tersedia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang/jasa yang relatif murah karena harganya ditentukan rendah oleh pemerintah (subsidi), Sukanto R (2001)

Pada sistem perekonomian campuran, pemerintah berpartisipasi dalam pasar sebagai pembeli barang dan jasa. Pemerintah membeli input dari rumah tangga dan mendapatkan hak kepemilikan dari sumber produktif (modal dan tanah). Pemerintah menggunakan input untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak dijual kepada sektor rumah tangga dan perusahaan, tetapi disediakan melalui distribusi tanpa melalui pasar. Namun demikian pemerintah juga memiliki dan

menjalankan perusahaan, seperti jasa pelayanan pos, kereta api dan lain-lain. Untuk membayar barang dan jasa yang dipergunakannya, pemerintah mendapatkan pemasukan dari perusahaan dan rumah tangga, seperti hasil pembayaran pajak, retribusi, royalti dan fee. Pemerintah menggunakan sumber daya yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk pertahanan, jalan, sekolah dan jasa-jasa lainnya.

Kebijakan makroekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada pada saat itu. Menurut Sadono S (2000) persoalan pokok dalam perekonomian adalah : 1) pengangguran; 2) Inflasi; 3) kekeluasan pertumbuhan ekonomi; 4) ketidakstabilan neraca pembayaran.

Bentuk utama dari kebijakan fiskal pemerintah adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak pendapatan. Penambahan pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) meminjam dari masyarakat melalui pasar modal (loanable fund); dan 2) meminjam dari bank sentral melalui pencetakan uang baru. Penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) menurunkan sejumlah pajak tertentu; dan 2) menurunkan persentase pajak pendapatan.

Peningkatan pengeluaran pemerintah merupakan konsekuensi dari ditentukannya program kerja yang membutuhkan anggaran yang besar, apabila pendapatan nasional dalam perencanaan adalah :

$$Y_o = 1/(1-b(1-t)) = (a + I_o + G_o) \dots \dots \dots (2.1)$$

Pertambahan pengeluaran pemerintah ΔG , dan Y_t merupakan pendapatan nasional yang baru ($\Delta Y = Y_t - Y_o$), maka besarnya ΔY dapat ditentukan dengan :

$$Y_o = 1/(1-b(1-t)) \cdot (a + I_o + G_o + \Delta G) - 1/(1-b(1-t)) (a + I_o + G_o) ; \dots\dots\dots(2.2)$$

atau

$$\Delta Y = 1/(1-b(1-t)) \cdot \Delta G. \dots\dots\dots(2.3)$$

Dalam keadaan keseimbangan di pasar modal ditentukan oleh penawaran tabungan (S) dan permintaan modal untuk Investasi (I). Keseimbangan awal dicapai pada E_o , yang berarti pada tingkat suku bunga r_o dan dana yang dipinjamkan adalah sebesar $S = I$ pertambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan peningkatan permintaan modal. Pada tingkat suku bunga tertentu, maka menyebabkan kurva permintaan dana bergerak ke kanan dari I menjadi $I + \Delta G$. Besarnya pergeseran ini dapat ditentukan dengan fiskal multiplier, $1/(1-C)$ dikalikan dengan besarnya kenaikan awal dari belanja fiskal.

Perubahan ini tidak mempengaruhi hasrat untuk menabung, sehingga kurva S tetap. Dengan demikian keseimbangan baru tercapai pada E_1 , dimana suku bunga telah meningkat menjadi r_1 dan dana yang dipinjamkan menjadi $I + \Delta G$ namun karena hasrat investasi masyarakat telah merosot dari I_o menjadi I_1 , sebagai akibat kenaikan suku bunga dari r_o menjadi r_1 , dan pengeluaran pemerintah dari G menjadi $G + \Delta G$.

Apabila pinjaman pemerintah sebanyak ΔG dibiayai oleh penurunan Investasi sebesar $\Delta I = I_o - I_1$, dan kenaikan tabungan masyarakat sebesar $\Delta S = S_1 - S_o$, maka kenaikan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada kenaikan suku

bunga dan selanjutnya menurunkan tingkat investasi swasta, kondisi ini disebut dengan *crowding out*.

Meskipun agregat demand akan naik mengikuti kenaikan pengeluaran pemerintah, akan tetapi efeknya tergantung juga kepada bentuk kurva agregat supply. Dalam kasus klasik semua efeknya akan terjadi pada harga dan keseimbangan output tetap. Sedangkan dalam kasus keynesian yang ekstrim, semua efeknya hanya akan jatuh kepada output, sementara harga-harga dianggap tetap. Dalam kasus keynesian secara umum, efeknya terdistribusi antara kenaikan output dan tingginya harga.

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Prop-Kab/Kota). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda, dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintahan yang lebih tinggi (Lee Robert D, Jr and Ronald W. Johnson)

Menurut Mangkoesubroto (1998;169) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian. Teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan dalam tiga golongan; yaitu :

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk menghindari terjadinya kegagalan pasar yang disebabkan oleh investasi swasta yang sudah semakin besar pula. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih pada bentuk pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial.

2. Hukum Wagner

Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Menurut Wagner (Mangkoesubroto, 1998) mengapa peranan pemerintah semakin besar, disebabkan karena pemerintah harus mengatur

hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi kebudayaan dan sebagainya.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*), yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPK_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPK_n}{PPK_n} \dots\dots\dots(2.4)$$

Keterangan :

- P_kPP : Pengeluaran pemerintah per kapita
- PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk
- $1,2..n$: Jangka waktu (tahun)

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Menurutnya, masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah regional (daerah), maka kita harus mengetahui keragaman fungsi yang

dibebankannya dimana fungsi-fungsi tersebut dapat digolongkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi kepada lingkungan dan masyarakat.
2. Fungsi pengaturan yaitu merumuskan dan menegakkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi pembangunan yaitu keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana
4. Fungsi perwakilan yaitu menyatakan pendapat daerah diluar bidang tanggung jawab eksekutif; dan
5. Fungsi koordinasi yaitu melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tataguna tanah regional (daerah) (Davey KJ, 1988)

Dalam RAPBD di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pengeluaran pembangunan dimaksudkan sebagai pengeluaran yang bersifat menambah kapital (investasi) masyarakat dalam bentuk proyek-proyek prasarana dasar dan sarana fisik.
2. Pengeluaran rutin secara umum diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi belanja pegawai, barang, perjalanan dinas, pemeliharaan, belanja rutin dan lain-lain seperti belanja pensiun dan subsidi.

Pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagai pembelanjaan otonomi, karena pendapatan nasional bukan merupakan faktor penting yang dapat

mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanjanya. Faktor yang menentukan pengeluaran pemerintah adalah 1) pajak yang diharapkan akan diterima, 2) pertimbangan-pertimbangan politik; dan 3) persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi (Sadono, 2000).

Dalam keadaan keseimbangan pada perekonomian tertutup, maka

$$Y = C + I + G \dots\dots\dots(2.5)$$

Dimana :

$$C + I + G = C + S + T \text{ atau } I + G = S + T \dots\dots\dots(2.6)$$

Apabila dimisalkan sistem pajak adalah tetap, maka pendapatan nasional dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = a + b Y_d + I_o + G_o$$

$$Y = a + b (Y - T_o) + I_o + G_o$$

$$Y - bY = a - bT_o + I_o + G_o$$

$$Y(1-b) = a - bT_o + I_o + G_o$$

$$Y = 1/(1-b) \cdot (a - bT_o + I_o + G_o)$$

Terjadinya perubahan pembelanjaan agregat, baik yang berasal dari pengurangan pajak, kenaikan ekspor atau penurunan impor akan mampu mengakibatkan perubahan keseimbangan dalam perekonomian dan perubahan dalam pendapatan nasional. Apabila pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar ΔG , maka kenaikan pendapatan nasional sebesar :

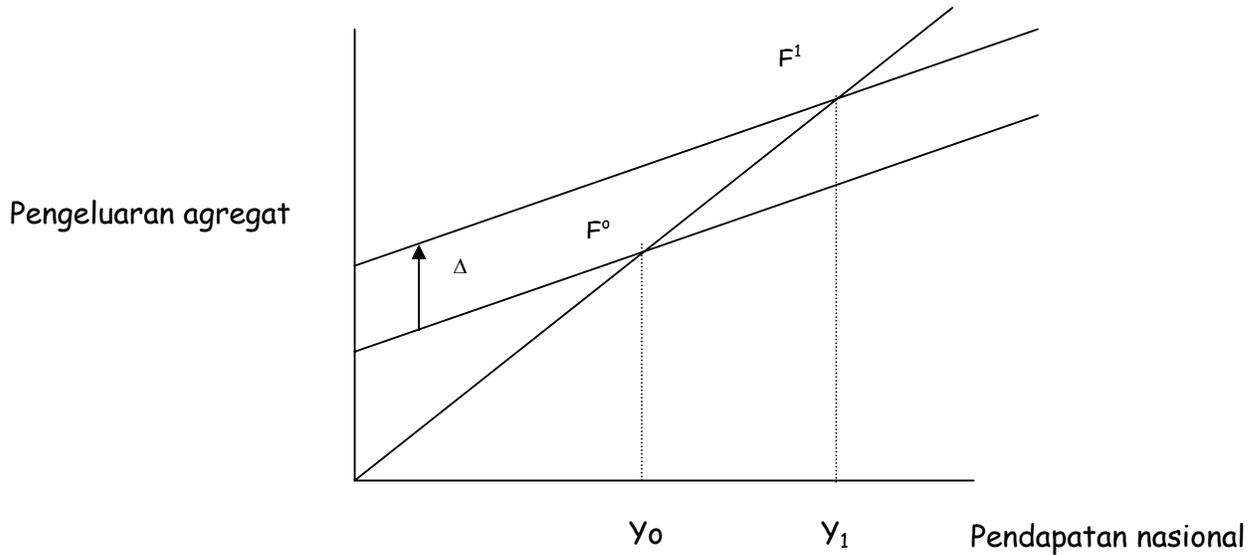
$$Y1 = 1/(1 - b) \cdot (a - bT_o + I_o + G_o + \Delta G)$$

$$\Delta Y = Y1 - Y_o = 1/(1-b) \cdot \Delta G \dots\dots\dots(2.7)$$

sedangkan multiplier (α) dari perubahan tersebut adalah sebesar :

$$\alpha = \Delta Y / \Delta G = 1 / (1-b) \dots \dots \dots (2.8)$$

Gambar 2.1
Efek Kenaikan Pengeluaran Pemerintah



Sumber : Makroekonomi Modern (Sadono Sukirno, 2000)

Dengan demikian hal ini memberikan gambaran bahwa semakin meningkatnya pendapatan daerah, karena peningkatan agregat demand akan mendorong kenaikan investasi dan akhirnya akan menyebabkan kenaikan produksi.

Dalam model pertumbuhan endogen, di katakan bahwa hasil investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternal positif) dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi

kecenderungan alamiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa faktor teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal, atau sumber daya manusia, sarana prasarana, infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumber daya manusia diakumulasikan. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

2.1.2 Peranan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi menurut Sadono Sukirno (2000) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran : 1) merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan

perkembangan ini menstimulir penambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta.

Korelasi positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana namun jelas di dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teori Harrod Domar (dikemukakan oleh Evsey domar dan R.F. Harrod) mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi yang sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa : 1) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh. 2) Dalam perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan, berarti sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). 4) Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga

rasio antara modal dan output (*Capital Output Ratio*) dan ratio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*).

Dalam Teori Harrod-Domar investasi dan *the incremental output ratio (ICOR)* merupakan dua variabel fundamental (Tambunan, 2001). Investasi dimaksud adalah investasi *netto*, yaitu perubahan/penambahan stok barang modal, atau :

$$I_t = \Delta K_t$$

$$I_t = K_t - K_{t-1} \dots \dots \dots (2.9)$$

ICOR adalah kebalikan dari rasio pertumbuhan *output* terhadap pertumbuhan investasi, yang pada intinya menunjukkan hubungan antara penambahan stok barang modal dan pertumbuhan *output*, atau melihat seberapa besar peningkatan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = y.K$$

$$I/y = K.Y \dots \dots \dots (2.10)$$

Keterangan :

- y = rasio *output* – kapital
- I/y = rasio kapital-*output* (COR)
- $ICOR = (\Delta K/Y) / (\Delta Y/Y)$ atau $ICOR = \Delta K / \Delta Y$

Beberapa studi kuantitatif yang dilakukan menemukan korelasi positif dan signifikan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001). Argumen utama dari hasil studi tersebut adalah bahwa investasi menambah

jumlah stok kapital per pekerja oleh karenanya menaikkan produktivitas. Teori ini memiliki kelemahan yaitu kecenderungan menabung dan ratio pertambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah dan selanjutnya akan mempengaruhi investasi.

Untuk meningkatkan output dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, melalui penambahan investasi guna memperbaharui teknologi yang digunakan dan / atau investasi guna meningkatkan kemampuan SDM (*human capital*). Dengan demikian akan meningkat rasio kapital - tenaga kerjanya. Dengan meningkatnya rasio antara kapital – tenaga kerja secara konsisten diharapkan akan meningkatkan PDRB (Neni Pancawati, 2000).

Investasi swasta atau PMDN *bruto* merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang sifatnya tidak stabil, dan menjadi salah satu sumber penting dari konjungtur dalam perekonomian. Besarnya investasi perusahaan dapat diterangkan dalam analisis hubungannya dengan tingkat suku bunga, apabila suku bunga rendah lebih banyak investasi yang akan dilakukan, dan sebaliknya kenaikan suku bunga akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi (Sadono Sukirno, 2000). Selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya UU PMA dan PMDN pada tahun 1966 memberikan persyaratan menarik, dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas (Mc Cawley P, 1981). Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas, diharapkan dapat meningkatkan PDRB Kota Semarang dari tahun ke tahun.

2.1.3 Peranan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985 : 45)

Sedangkan angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memperoleh hasil produksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau mencari pekerjaan.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan

dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, peranan tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Menurut Nicholson W (1991) bahwa suatu fungsi produksi pada suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K,L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah barang / jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L , maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marginal (*marginal physical product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan *output*,

namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan *output* serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimum setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi keluaran.

Menurut Todaro (2000), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan, apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Regional (daerah)

Menurut Sadono Sukirno (1985) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan atas harga konstan. Jadi perubahan dalam nilai pendapatan hanya semata-mata disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Menurut Faried W (1992) menerangkan dua konsep pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil. Output riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi pertumbuhan, statis ataupun penurunan, dimana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat positif sedangkan penurunan merupakan perubahan negatif.
2. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output total riil perkapita. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tingkat kenaikan output total riil $>$ daripada tingkat penambahan penduduk, sebaliknya terjadi penurunan taraf hidup actual bila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada laju penambahan output total riil.

Pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999). Pada saat ini tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya inti dari teori ekonomi regional tersebut berkisar pada metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (regional)

Pengertian pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Djojohadikusuma, 1994).

Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

2.1.4.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi :

Teori pertumbuhan ekonomi pada intinya terdiri atas dua mazhab, yaitu Mazhab Historimus yang antara lain terdiri dari : teori Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Bucher, Walt Whitman Rostow dan Mazhab Analistis yang terdiri dari : teori pertumbuhan Klasik, David Ricardo, Neo Klasik dan Keynesian.

2.1.4.1.1 Mazhab Historimus

Mazhab Historimus melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Metode kajian dalam mazhab ini bersifat induktif empiris dimana fenomena ekonomi adalah perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu dalam perjalanan sejarah.

2.1.4.1.1.1 Teori Friedrich List

Teori ini menyatakan bahwa sistem liberalisme yang *laissez-faire* dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal dimana perkembangan suatu perekonomian tergantung pada peran pemerintah, organisasi swasta dan

lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. Negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah diantara masyarakat.

2.1.4.1.1.2 Teori Walt Whitman Rostow

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional (*the traditional society*), pra syarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take off*), tinggal landas (*the take-off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturity*) dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*). Rostow berpendapat bahwa yang menjadi dasar perbedaan tahap pembangunan ekonomi tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, social dan politik yang terjadi di masyarakat.

2.1.4.1.2 Mazhab Analitis

Teori yang tergabung dalam mazhab ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan konsisten, tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada spek empiris (*histories*)

2.1.4.1.2.1 Teori Pertumbuhan Klasik

Ahli-ahli ekonomi yang tergabung dalam kelompok ini adalah Thomas Robert Malthus, Adam Smith dan David Ricardo. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, kekayaan alam dan teknologi yang digunakan (Sadono Sukirno, 2000)

Adam Smith menyatakan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu suasana yang mengakibatkan perekonomian berfungsi secara efisien. Perkembangan pasar juga akan menaikkan pendapatan nasional dan pertumbuhan penduduk dari masa ke masa yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan pendapatan nasional, akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak (Sadono Sukirno, 2000)

Sedangkan Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsisten. Pada mulanya ketika jumlah penduduk/tenaga kerja relatif sedikit dibandingkan dengan faktor produksi lain, maka penambahan penduduk/tenaga kerja akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Akan tetapi apabila jumlah penduduk/tenaga kerja berlebihan dibandingkan dengan faktor produksi lain, maka penambahan penduduk/tenaga kerja akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat (Sadono Sukirno, 2000)

Menurut Ricardo faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal (Arsyad, 1999).

2.1.4.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional Neo Klasik (Solow-Swan)

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak

jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 1999). Definisi ini memiliki tiga komponen : 1) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang, 2) teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka barang kepada penduduk, 3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut Solow dan Swan, bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang bergantung pertambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1999)

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output ratio = COR*) bisa berubah (bersifat dinamis), untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula sesuai dengan yang dibutuhkan. Model Solow mendasarkan pada fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu :

$$Q = A.K^{\alpha}. L^{\beta} \dots\dots\dots(2.11)$$

Dimana Q adalah output, A adalah teknologi, K adalah modal fisik, L adalah tenaga kerja, α dan β adalah proporsi (*share*) input. Model Solow dapat menunjukkan arah pertumbuhan keadaan mantap serta situasi pertumbuhan jangka

panjang yang ditentukan oleh peranan tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang semakin luas.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam *capital stock*, pertumbuhan tenaga kerja dan perkembangan teknologi mempengaruhi tingkat *output*. Untuk menjelaskan teori pertumbuhan Solow maka pertama akan dianalisis bagaimana peranan stok modal dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi tanpa adanya perkembangan. Apabila dimisalkan suatu proses pertumbuhan ekonomi dalam keadaan dimana teknologi tidak berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai hanya karena adanya perubahan jumlah modal (K) dan jumlah tenaga kerja (L). Hubungan kedua faktor tersebut dengan pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai fungsi produksi :

$$Y = f(K,L) \dots \dots \dots (2.12)$$

Dimana Y adalah tingkat pendapatan nasional, K adalah jumlah stok modal dan L adalah jumlah tenaga kerja.

Jika jumlah modal naik sebesar ΔK unit, jumlah *output* akan meningkat sebesar *marginal product of capital (MPK)* dikalikan dengan ΔK , dimana :

$$MPK = f(K + \Delta, L) - f(K,L) \dots \dots \dots (2.13)$$

Jika tenaga kerja meningkat sebesar ΔL unit, maka jumlah output akan meningkat sebesar *marginal product of labour (MPL)* dikalikan ΔL , dimana :

$$MPL = f(K, L + \Delta) - f(K,L) \dots \dots \dots (2.14)$$

Perubahan ini akan lebih realistis apabila kedua faktor produksi ini berubah, yaitu terjadi perubahan modal sebesar ΔK serta terjadi perubahan jumlah

tenaga kerja sebesar ΔL . Kita dapat membagi perubahan ini dalam dua sumber penggunaan *marginal products* dari dua *input* :

$$\Delta Y = (MPK \times \Delta K) + (MPL \times \Delta L) \dots\dots\dots(2.15)$$

Dalam kurung pertama adalah perubahan *output* yang dihasilkan dari perubahan modal, dan dalam kurung yang kedua adalah perubahan *output* yang disebabkan oleh adanya perubahan tenaga kerja.

Untuk mempermudah interpretasi dan penerapan, maka persamaan kemudian diubah menjadi :

$$\Delta Y/Y = (MPK \times K/Y) \Delta K/K + (MPL \times L/Y) \Delta L/L \dots\dots\dots(2.16)$$

Dimana $\Delta Y/Y$ adalah laju pertumbuhan output, $MPK \times K$ adalah *total return to capital*, $(MPK \times K/Y)$ adalah *share* dari modal pada *output*, $\Delta K/K$ adalah tingkat pertumbuhan dari modal, $MPL \times L$ adalah total kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja, $(MPL \times L/Y)$ adalah *share* dari tenaga kerja pada *output*, dan $\Delta L/L$ adalah tingkat pertumbuhan dari tenaga kerja. Dengan asumsi bahwa fungsi produksi dalam keadaan skala hasil tetap, maka teorema Euler menyatakan bahwa kedua *share* tersebut apabila dijumlahkan akan sama dengan 1 (satu) (Mankiw).

Persamaan ini kemudian dapat ditulis :

$$\Delta Y/Y = \alpha \Delta K/K + (1 - \alpha) \Delta L/L \dots\dots\dots(2.17)$$

Dimana α adalah *share* dari modal dan $(1 - \alpha)$ adalah *share* dari tenaga kerja.

Telah dikemukakan bahwa pembahasan di atas diasumsikan tidak mengalami perubahan teknologi, tetapi dalam praktiknya akan selalu terjadi perkembangan dari teknologi. Oleh karenanya akan dimasukkan perubahan teknologi dalam fungsi produksi menjadi :

$$Y = A f(K,L) \dots \dots \dots (2.18)$$

Dimana A adalah tingkat teknologi pada saat sekarang atau yang disebut sebagai *total factor productivity*. Sekararang *output* meningkat bukan hanya karena adanya peningkatan dari modal dan tenaga kerja, tetapi juga karena adanya kenaikan dari *total factor productivity*.

Dengan memasukkan *total factor productivity* pada persamaan (2.18), maka akan menjadi :

$$\Delta Y/Y = \alpha \Delta K/K + (1 - \alpha) \Delta L/L + \Delta A/A \dots \dots \dots (2.19)$$

Dimana $\Delta A/A$ adalah pertumbuhan dari *total factor productivity* atau juga sering disebut sebagai *Solow residual* (Mankiw, 1997). Karena pertumbuhan *total factor productivity* tidak bisa dilihat secara langsung, maka diukur secara tidak langsung dihitung dengan cara :

$$\Delta A/A = \Delta Y/Y - \alpha \Delta K/K - (1 - \alpha) \Delta L/L \dots \dots \dots (2.20)$$

Total factor productivity dapat berubah dengan beberapa alasan. Perubahan sering dikaitkan dengan kenaikan pengetahuan pada metode produksi. *Solow residual* sering juga digunakan untuk mengukur perkembangan teknologi. Faktor-faktor produksi seperti pendidikan, regulasi pemerintah dapat mempengaruhi *total factor productivity*. Sebagai contoh, jika pengeluaran pemerintah meningkat maka akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, para pekerja akan menjadi lebih produktif , dan *output* juga akan meningkat, yang mengimplikasikan *total factor productivity* yang lebih besar. (Mankiw, 1997)

2.1.4.1.2.3 Teori Pertumbuhan Keynesian (Harrod-Domar)

Harrod Domar menganalisis tentang syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap (*steady growth*). Menurut Harrod Domar investasi memberikan peranan kunci dalam prosers pertumbuhan yang disebabkan karena :

1. Investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran
2. Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak dari penawaran.

$$\Delta c = \frac{I}{COR}$$

$$\Delta Y = \frac{I}{COR} \cdot \Delta I$$

$$\Delta c = \Delta Y \dots\dots\dots (2.21).$$

Dengan demikian :

$$\frac{I}{COR} = \frac{I}{MPS} \cdot \Delta I$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{MPS}{COR} \dots\dots\dots (2.22)$$

Dari persamaan model di atas Harrod Domar mencoba menjelaskan bahwa tambahan modal dalam suatu periode *t* menjadi sumber dasar bagi bertambahnya hasil produksi di periode tertentu (*t + 1*). Investasi pada saat ini meningkatkan kemampuan produksi dan menambah pendapatan di masa datang.

2.1.4.1.2.4 Teori Pertumbuhan Schumpeter

Menurut Schumpeter, factor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para innovator dengan inovasi-inovasinya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah factor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para innovator.

2.1.4.1.2.5 Teori Penyebab Kumulatif (*Cumulative Causation Theory*)

Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Myrdal (1957) yang mengkritik teori neoklasik mengenai konsep pertumbuhan yang stabil. Myrdal menyatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar daerah selamanya akan menimbulkan adanya "*backwash effect*" yang mendominasi "*spread effect*" dan proses pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak equilibrium. Perbedaan utama dari teori neoklasik dan Myrdal adalah yang pertama menggunakan constant return to scale dan yang kedua menggunakan increasing return to scale. Perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah mungkin akan menjadi sangat besar jika increasing return to scale effect berlangsung terus.

Menurut Kaldor (1970) prinsip-prinsip dari penyebab kumulatif adalah penyederhanaan dari increasing return to scale di perusahaan. *Increasing return to*

scale ini membantu memperkaya sementara dan mencegah meluasnya daerah miskin. Kekuatan pasar menyebabkan adanya pengelompokan aktivitas dengan *increasing return to scale* di area perekonomian tertentu. Hal ini menimbulkan adanya eksternalitas atau internalitas di pusat aglomerasi. Keunggulan yang terbatas dari suatu daerah terbelakang (*backward region*), seperti tenaga kerja yang murah, tidak mencukupi untuk bersaing dengan aglomerasi ekonomis.

2.1.4.1.2.6 Model Pertumbuhan Agregat

Glasson (1997) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis jangka pendek yang diasumsikan konstan, seperti penduduk, upah, harga teknologi dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada umumnya orang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen atau eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor penentu penting dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Sedangkan salah satu faktor penentu dari luar daerah yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Suatu pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan faktor penentu endogen dari pertumbuhan ekonomi regional adalah melalui penggunaan model ekonomi makro. Model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha

menjelaskan output regional menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri (Glasson, 1997) dan dapat dituliskan sebagai berikut :

$$O_n = f_n (K, L, Q, Tr, T, So) \dots \dots \dots (2.23)$$

Keterangan :

- O_n : Output potensial dari daerah n
- K : Modal (Kapital)
- L : Tenaga Kerja
- Q : Tanah
- Tr : Sumber daya pengangkutan
- T : Tekhnologi
- So : Sistem Sosial Politik

Apabila dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitaskan, maka rumus mengenai persamaan pertumbuhan sebagai berikut :

$$O_n = a_n k_n + (1-a_n) l_n + t_n \dots \dots \dots (2.24)$$

Keterangan :

- O, k, l, t : tingkat pertumbuhan output, modal, tenaga kerja dan tekhnologi
- a : bagian pendapatan yang diperoleh modal (yakni produk marginal dari modal)

2.1.4.1.2.7 Teori Basis Ekspor

Teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktifitas di suatu daerah adalah basis dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas lain (non basis) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh

tersebut. Menurut teori ini, semua pembangunan regional ditentukan oleh sektor basis sedangkan sektor non basis yang mencakup sektor-sektor pendukung melayani sektor basis tersebut (Hoover, 1984 dalam Prasetyo Soepomo, 2001). Selanjutnya di katakan bahwa perekonomian lokal harus menambah aliran uang masuk agar dapat tumbuh dan satu satunya cara yang efektif adalah menambah ekspor.

Konsep kunci dari teori ini adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor dengan demikian ditentukan oleh permintaan eksternal. Untuk menentukan dan mengukur suatu basis, maka satuan ukuran yang dipilih dapat berupa pendapatan daerah, employment (kesempatan kerja), nilai tambah, output, penjualan kotor dan sebagainya. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menentukan sektor basis ada dua, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan dengan cara mengukur aliran komoditi dan uang, serta melakukan survai tentang perekonomian lokal. Sedangkan pendekatan tidak langsung meliputi pendekatan asumsi, LQ dan persyaratan minimum.

Pada pendekatan asumsi, maka sektor basis di suatu daerah diasumsikan, sedangkan sektor lainnya diasumsikan non basis. Dalam metode ini memiliki kelemahan karena dalam penentuan asumsi dapat salah. Metode LQ yang sangat populer serta penggunaannya berkelanjutan dari pengganda basis ekonomi.

Pendekatan dengan analisis LQ memiliki beberapa kekurangan (Prasetyo Soepomo, 2001), yaitu :

1. Mengasumsikan adanya permintaan yang seragam/sama, padahal penduduk memiliki selera yang berbeda.
2. Asumsi produktivitas adalah sama antar daerah. Masalah product mix (produk dari merk yang satu diekspor, sedang produk yang sama dengan merk lain diimpor).
3. Ketidakmampuan menerangkan keterkaitan antar industri.
4. Metode LQ bergantung pada tingkat agregat data.

2.1.5 Penelitian terdahulu

2.1.5.1. Kim, Sung Tai (1997)

Dalam penelitiannya tentang kasus pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (ΔY) merupakan fungsi dari laju pertumbuhan angkatan kerja (ΔL), rasio investasi swasta terhadap PDRB (I_p/Y); rasio investasi pemerintah daerah terhadap PDRB (I_g/Y); rasio pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB (G/Y); dan rasio penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah dan penerimaan non pajak terhadap PDRB (R/Y) :

$$\Delta Y = f(\Delta L, I_p/Y, I_g/Y, (G/Y) \Delta G, R/Y)$$

Dinyatakan dalam model :

$$\Delta Y = \beta_0 + \beta_k (I_p/Y) + \beta_i * \Delta L + \gamma_x (I_g/Y) + \gamma_g (G/Y) \Delta G + \theta (R/Y) + \theta D80 + \mu \dots \dots (2.25)$$

D 80 merupakan variabel dummy tahun 1980 karena Korea tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif disebabkan kekacauan ekonomi dan politik.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara angkatan kerja, investasi dan konsumsi pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan disparitas pendapatan antar daerah lebih disebabkan oleh sektor swasta (investasi swasta) hasil estimasi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1

2.1.5.2 Edi Suandi Hamid (1999)

Dalam penelitiannya tentang peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi di beberapa negara dengan menggunakan analisa kualitatif menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam suatu perekonomian adalah mutlak. Untuk mendukung peran tersebut, maka perlu tersedia kelembagaan yang kuat guna melengkapi dan mengontrol jalannya lembaga pemerintah tersebut. Untuk mendukung perekonomian suatu negara BUMN masih diperlukan untuk melengkapi sektor swasta. Namun dalam penelitian ini tidak mampu menunjukkan atau mengukur seberapa besar peran pemerintah dalam perekonomian di suatu negara.

2.1.5.3 Muljono (1999)

Dalam penelitiannya tentang pengaruh dana pembangunan APBD tingkat I terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dengan menggunakan model pertumbuhan ekonomi pendekatan fungsi produksi Cobb Douglas yang dirumuskan sebagai berikut :

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1 Ig + \beta_2 Is + \beta_3 L + \beta_4 Ig_{t-1} + \beta_5 Is_{t-1} + \beta_6 L_{t-1} + \mu \dots \dots (2.26)$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pembangunan APBD tingkat I Jawa Tengah keberadaannya sangat penting dan pengaruhnya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dibandingkan dengan pengaruh investasi swasta.

2.1.5.4 Siti Aisyah Tri Rahayu (2000)

Dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (ΔY) merupakan fungsi dari laju pertumbuhan angkatan kerja (ΔL), rasio investasi swasta PMA dan PMDN yang disetujui terhadap PDRB (IP), rasio investasi pemerintah daerah terhadap PDRB (IG), rasio pengeluaran/konsumsi pemerintah (belanja rutin) daerah terhadap PDRB ($(G/Y) \Delta G$) dan rasio penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah dan penerimaan non pajak terhadap PDRB (R/Y), dengan persamaan fungsi sebagai berikut :

$$\Delta Y = f(\Delta L, IP/Y, IG/Y, (G/Y) \Delta G, R/Y) \dots \dots \dots (2.27)$$

Model :

$$\Delta Y = \beta_0 + \beta_1 * \Delta L + \beta_k (Ip/Y) + \gamma_x (Ig/Y) + \gamma_g (G/Y) \Delta G + \theta (R/Y) + \mu \dots \dots (2.28)$$

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi swasta dan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tanpa memasukkan hasil migas ternyata investasi pemerintah daerah mempunyai efek yang negatif, sedangkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah dan non pajak memberikan efek positif yang signifikan.

2.1.5.5 Arief Hadiono (2001)

Dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Tengah menggunakan data polling sampel populasi kab/kota di Jateng selama tahun 1994-1998 menyebutkan bahwa output suatu daerah (PDRB) merupakan fungsi dari investasi pemerintah, penyerapan tenaga kerja dan sarana angkutan umum.

$$PDRB = f(TK, INV, AKT). \dots \dots \dots (2.29)$$

Model :

$$L PDRB = \beta_0 + \beta_1 LTK_{it} + \beta_2 LINV_{it} + \beta_3 LAKT_{it} + v. \dots \dots (2.30)$$

Keterangan :

INV : Investasi pemerintah

TK : Angkatan Kerja

AKT : Sarana Angkutan Umum

Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan daerah

2.1.5.6 Sofwin Hardiati (2002)

Dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Prop. Jateng dengan menggunakan data runtut waktu Prop. Jateng selama tahun 1980-2001 menyebutkan bahwa output suatu daerah (PDRB) merupakan fungsi dari investasi swasta baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN), pengeluaran pembangunan pemerintah, jumlah tenaga kerja dan sarana angkutan umum.

$$PDRB = f(LPMA \$, LPMDN, LPPB, LTK, LSAU). \dots \dots (2.31)$$

Dengan permodelan sebagai berikut :

$$LPDRB = \beta_0 + \beta_1 LPMA \$ + \beta_2 LPMDN + \beta_3 LPPB + \beta_4 LTK + \beta_5 LSAU + v \dots \dots (2.32)$$

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi swasta baik PMDN dan PMA, pengeluaran pembangunan pemerintah, angkatan kerja dan sarana angkutan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.5.7 Ida Bagus Raka Surya Atmaja (2001)

Menganalisis pengaruh investasi swasta, investasi sektor publik yang meliputi investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, penerimaan pemerintah dari sektor pajak/non pajak serta pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian kabupaten dan kota di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan yang sangat dominan di Propinsi Bali, terlihat dari signifikansinya melebihi investasi pemerintah. Hal ini menunjukkan dalam suatu perekonomian diharapkan peranan pemerintah semakin berkurang hanya sebagai fasilitator dan peranan masyarakat swasta semakin meningkat.

Tabel 2.1
Hasil Perhitungan Model Regresi Hasil Penelitian Sebelumnya

Variabel	Koefisien	t – hit	Ket
1. Kim, Sung Tai (1997)			
L	0,1679	3,538	***
Ip/Y	0,1385	2,255	**
Ig/Y	2,2961	3,588	***
(G/Y) G	3,3539	2,301	**
R/Y	- 1,7446	2,598	***
D 80	- 0,1943	10,551	***
R² = 0,4717			
2. Siti Aisyah TR (2000)			
Y tanpa migas sebagai variabel dependen			
L	1,77 E – 0,5	0,239	
Ip/Y	0,001	0,149	
Ig/Y	- 0,017	-3,711	***
(G/Y) G	- 0,005	- 0,893	
R/Y	0,002	2,005	**
Adj R² = 0,99		F = 67193,44	
Y dengan migas sebagai variabel dependen			
L	2,262	1,538	
Ip/Y	-2,973	- 3,133	***
Ig/Y	3,900	3,977	***
(G/Y) G	- 1,436	- 8,471	***
R/Y	- 16,225	- 4,852	***
Adj R² = 0,26		F = 30,2644	
3. Arief Hadiono (2001)			
C	2,6996	4,0679	***
L TK	0,6048	10,2057	***
L INV	0,0688	2,4860	**
L AKT	0,3160	5,0231	***
Adj R² = 0,6269	F hit = 98,4925		
4. Sofwin Hardiati			
C	1,2861	0,0485	***
LPMA	0,0298	3,0638	***
LPMDN	0,0455	3,3748	***
LPPB	0,1647	7,1721	***
LTK	0,6273	3,6221	***
LSAU	0,2842	7,3398	***
Adj R² = 0,999	F hit = 10588,53		

Keterangan :

*** = signifikan pada taraf 1 %

** = signifikan pada taraf 5 %

2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan telaah pustaka, beberapa hal dapat dilakukan sebagai dasar bagi peneliti dalam membantu melakukan pengkajian mengenai kebijakan pemerintah khususnya pengeluaran pemerintah dengan ruang lingkup pemerintah daerah. Bahwa sebagaimana dalam konteks negara, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam kerangka mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat dihadapi oleh pasar yaitu dalam hal penyediaan barang-barang publik. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna tercapainya pendapatan perkapita masyarakat. Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan bukanlah semata-mata menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan.

Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan yaitu pembelanjaan (pembangunan dan rutin) dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan yaitu : 1) pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output); 2) pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) dan investasi pemerintah (belanja pembangunan/barang-barang modal)

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi. Pengeluaran rutin pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah

Kota Semarang, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah.

Dalam penelitian ini pendekatan fungsi produksi Coub Douglas digunakan dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk menunjukkan hubungan perimbangan antara hasil produksi di satu pihak dan di lain pihak suatu kombinasi berbagai rupa sarana produksi (faktor produksi) yang digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain fungsi produksi mengungkapkan berapa banyak hasil produksi yang diperoleh dengan menggunakan suatu kombinasi tertentu perihal sejumlah sarana produksi.

Berdasarkan uraian di atas maka kajian dalam penelitian yang mengambil kasus di Kota Semarang dengan variabel-variabelnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang yang dipengaruhi oleh belanja rutin pemerintah (G), belanja pembangunan pemerintah (IG), investasi swasta (IP) dan angkatan kerja (L).

Untuk penentuan besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang, dapat dibangun suatu fungsi berdasar pendekatan Kim (1997) sebagai berikut :

$$PDRB_t = f(G_t, IG_t, IP_t, L_t, \dots) \dots \dots \dots (2.33)$$

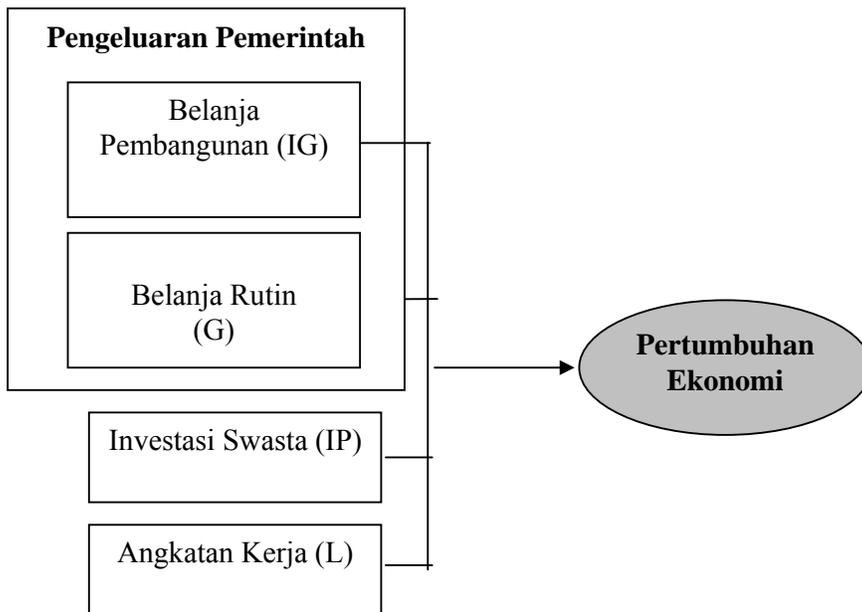
Sedangkan model yang digunakan dengan beberapa modifikasi dalam bentuk logaritma sebagai berikut.

$$LYn_t = \alpha_0 + \alpha_1 LG_t + \alpha_2 LIG_t + \alpha_3 LIP_t + \alpha_4 LL_t + \mu \dots\dots\dots(2.34)$$

Keterangan :

- α_0 = Konstanta
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ = Parameter yang diestimasi
- LYn_t = Pertumbuhan ekonomi pada tahun t
- LG_t = Belanja Rutin Pemerintah pada tahun t
- LIG_t = Belanja Pembangunan Pemerintah pada tahun t
- LIP_t = Investasi Swasta pada tahun t
- LL_t = Angkatan Kerja pada tahun t
- μ_t = Variabel gangguan pada tahun t

Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3. Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Belanja Rutin dan belanja Pembangunan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Peran pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi adalah terwujudnya pembangunan ekonomi daerah dengan terciptanya lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pengeluaran pemerintah yang mencerminkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa serta biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Anggaran belanja pembangunan digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi guna mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Dana pembangunan juga merupakan salah satu input yang dapat menghasilkan segenap output.

Belanja rutin digunakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sekalipun pengeluaran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, melainkan menunjang kegiatan pemerintahan serta peningkatan jangkauan mutu pelayanan.

2.3.2 Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Peranan sektor swasta dalam kegiatan perekonomian daerah terutama adalah untuk menanamkan modalnya baik di daerah maupun tingkat regional, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Perkembangan investasi swasta sangat tergantung dari fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah

berupa sarana dan prasarana yang merangsang guna menarik investor asing maupun dalam negeri.

2.3.3 Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis berkaitan dengan penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut :

H1 : Belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota semarang

H2 : Belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang

H3 : Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota semarang

H4 : Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota semarang

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi empiris terhadap pengaruh faktor pengeluaran pemerintah (belanja pembangunan dan belanja rutin), investasi swasta dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang.

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Semarang dengan menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) tahunan dari tahun 1982 – 2003 yang ditunjang dengan studi kepustakaan.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 1982 sampai dengan 2003 (variabel dependen).
2. Realisasi Pengeluaran rutin Pemerintah Daerah dari tahun 1982 sampai dengan 2003 (Variabel independen).
3. Realisasi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah dari tahun 1982 sampai dengan 2003 (Variabel independen).
4. Investasi Swasta di Kota Semarang dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2003 (Variabel independen).
5. Angkatan Kerja dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2003 (Variabel independen).

3.2 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan data yang bersumber dari publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bank Indonesia (BI) dan terbitan resmi pemerintah maupun dengan cara studi pustaka dari literatur dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.3. Teknik Analisis

Pembahasan mengenai pemantauan terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah daerah Kota Semarang, di dekati melalui dua hal :

1. Perkembangan pengalokasian pengeluaran pemerintah (meliputi pertumbuhan dan proporsi belanja rutin dan pembangunan dari tahun ke tahun)
2. Pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk memenuhi tujuan penelitian serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan maka dilakukan langkah analisis sebagai berikut :

1. Deskripsi tentang perkembangan pola alokasi pengeluaran pemerintah daerah tahun 1983 sampai dengan 2003, yang meliputi proporsi dan pertumbuhan untuk tiap-tiap jenis pengeluaran. Dari analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai konsistensi serta kesinambungan kebijakan pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun;

2. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif induktif, yaitu teknik analisis yang dapat digunakan untuk menaksir parameter. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 11.5. Dari analisis ini diharapkan dapat diperoleh petunjuk mengenai seberapa besar pengaruh dari kebijakan pengeluaran pemerintah (dengan pola sebagaimana ditunjukkan dalam analisis pertama) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk menganalisis hubungan/pengaruh antara variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) dengan variabel independen (belanja pembangunan, belanja rutin, investasi swasta dan tenaga kerja) serta untuk mengetahui sejauh mana besar dan arah dari hubungan variabel tersebut digunakan analisis regresi. Sedangkan analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat/derajat keeratan antara variabel yang ada

Model adalah ringkasan teori yang dinyatakan dalam formulasi matematika. Untuk mencapai tujuan dimaksud digunakan model ekonometrika, yang merupakan pola khusus dari model matematika mencakup juga variabel pengganggu (error term) (Herlambang, 2002)

Analisis regresi yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Method of Ordinary Least Square) OLS. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang dapat diunggulkan yaitu secara teknis sangat akurat, mudah dalam menginterpretasikan perhitungannya serta sebagai alat estimasi linier dan unbiased terbaik (Gujarati, 1999).

Regresi dilakukan terhadap model persamaan regresi yang diturunkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas yang ditunjukkan sebagai berikut :

$$Q = f(K, L) \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan :
 Q = Produksi
 K = Kapital, dan
 L = tenaga kerja

Selanjutnya dalam penelitian ini diasumsikan bahwa Q adalah PDRB yang merupakan variabel dependen, sedangkan K adalah variabel independen yang terdiri dari belanja pembangunan pemerintah (IG), belanja rutin pemerintah (G), investasi swasta (IP) serta L adalah angkatan kerja (L)

Model dasar yang digunakan berdasarkan pendekatan Kim sebagai berikut :

$$PDRB = f(G, IG, IP, L) \dots \dots \dots (3.2)$$

Sedangkan model yang digunakan dengan beberapa modifikasi dalam bentuk logaritma sebagai berikut.

$$PDRB = G^{\alpha_1} + IG^{\alpha_2} + IP^{\alpha_3} + L^{\alpha_4} \dots \dots \dots (3.3)$$

$$Ln PDRB = \alpha_0 + \alpha_1 LnG_t + \alpha_2 LnIG_t + \alpha_3 LnIP_t + \alpha_4 LnL_t + \mu \dots \dots \dots (3.4)$$

$$LYn_t = \alpha_0 + \alpha_1 LG_t + \alpha_2 LIG_t + \alpha_3 LIP_t + \alpha_4 LL_t + \mu \dots \dots \dots (3.5)$$

Keterangan :

- α_0 = Konstanta
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ = Parameter yang diestimasi
- LYn_t = Pertumbuhan ekonomi pada tahun t
- LG_t = Belanja Rutin Pemerintah pada tahun t
- LIG_t = Belanja Pembangunan Pemerintah pada tahun t
- LIP_t = Investasi Swasta pada tahun t
- LL_t = Angkatan Kerja pada tahun t
- μ_t = Variabel gangguan pada tahun t

Terkait dengan model alat analisis yang digunakan untuk mengkaji mengenai pengaruh kebijakan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka digunakan beberapa variabel lain (investasi swasta dan angkatan kerja) yang turut mempengaruhi kinerja pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebelum dilakukan pembahasan, maka perlu dilakukan beberapa langkah yakni penyesuaian data (konversi tahun dasar PDRB) dan uji keeratan hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen serta Uji model (statistik dan asumsi klasik) terhadap model yang digunakan.

3.3.1 Konversi Tahun Dasar PDRB

Data PDRB yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan mulai tahun 1983-2003, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai PDRB yang menggunakan tahun dasar 1983 menjadi tahun dasar 1993.

Formulasi penyesuaian yang digunakan adalah (Ace Partadiredja, 1999) :

- Tahun 1993 menjadi tahun dasar (=100)
- Rumus yang digunakan adalah :

$$PDRB_t = \frac{PDRB_t}{PDRB\ 1993^*} \times PDRB\ 1993^{**} \dots\dots\dots(3.6)$$

Keterangan :

- PDRB_t = PDRB tahun 1982-1992 dengan tahun dasar 1983 yang akan di konversi
- PDRB 1993 * = PDRB tahun 1993 dengan tahun dasar 1983
- PDRB 1993 * * = PDRB tahun 1993 dengan tahun dasar 1993

3.3.2 Uji Model

Sebelum digunakan untuk pengujian hipotesis, maka model yang dihasilkan melalui regresi dilakukan pengujian untuk mendapatkan “best fit model”. Realibilitas parameter yang diestimasi dapat dilihat melalui tiga kriteria :

1. Kriteria ekonomi, yang ditetapkan berdasarkan teori ekonomi yang ada
2. Kriteria statistik, yang meliputi uji signifikansi parameter secara individual (uji t), simultan (uji F), uji R square dan uji tanda koefisien yang dihasilkan (uji orde I)
3. Ketiadaan penyimpangan terhadap asumsi-asumsi klasik, yang meliputi uji Linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heterokedstisitas (Uji Orde II).

Untuk model-model yang telah melewati uji signifikansi dan uji asumsi klasik baru dapat dipergunakan untuk uji hipotesis. Penjelasan dari uji yang dimaksud di atas adalah :

1. Uji Signifikansi (Pengujian secara statistik orde I) :

a. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan t (t-statistik) merupakan suatu perhitungan untuk mencari signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari t- statistik yang telah diketahui, kemudian dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan menggunakan dua arah pada derajat kepercayaan tertentu. Variabel independen dikatakan signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai t-statistik variabel independen terletak di dalam daerah

kritis atau dengan kata lain bahwa nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, hal ini berarti terdapat pengaruh yang cukup berarti dari variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya apabila nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel, maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang berarti.

Pengujian statistik secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ho : $\alpha_1 = 0$ Belanja rutin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang
Ha : $\alpha_1 > 0$ Belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang
2. Ho : $\alpha_2 = 0$ Belanja pembangunan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang
Ha : $\alpha_2 > 0$ Belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang
3. Ho : $\alpha_3 = 0$ Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang
Ha : $\alpha_3 > 0$ Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang
4. Ho : $\alpha_4 = 0$ Angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang
Ha : $\alpha_4 > 0$ Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang

b. Uji F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan pengaruh (signifikan) variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel tak bebas. Nilai F statistik dapat dihitung dengan melihat nilai dari F tabel. Nilai F statistik dikatakan signifikan apabila nilainya terletak di dalam daerah kritis, atau hipotesisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ho : $\alpha_1 ; \alpha_2 ; \alpha_3 ; \alpha_4 = 0$

Jumlah belanja rutin, belanja pembangunan, investasi swasta dan angkatan kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang

2. Ha : $\alpha_1 ; \alpha_2 ; \alpha_3 ; \alpha_4 \neq 0$

Jumlah belanja rutin, belanja pembangunan, investasi swasta dan angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang

Nilai F statistik dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$F = \frac{\text{MSS dari ESS}}{\text{MSS dari RSS}} = \frac{R^2 / k-1}{(1-R^2) / n-k} \dots\dots\dots(3.7)$$

Mengikuti distribusi F dengan derajat kebebasan K-1 dan n-1, Keterangan :

- n = jumlah observasi
- MSS = jumlah kuadrat yang dijelaskan
- RSS = rata-rata jumlah kuadrat
- K = jumlah parameter (termasuk intersep)

ESS = jumlah kuadrat residual
 R^2 = koefisien determinan

Menurut Mudrajat (2001), cara melakukan uji F adalah sebagai berikut :

1. Quick look = bila nilai F lebih besar dari 4, maka H_0 ditolak dengan derajat kepercayaan 5 % dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis H_0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

c. Perhitungan R^2 (koefisien determinan)

Koefisien determinan di gunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variabel dependen atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen dengan semua variabel independen secara bersama-sama. Untuk menghitung determinasi (R^2) dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/n-k} \dots\dots\dots(3.8)$$

Persamaan di atas menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat (TSS) yang diterangkan oleh variabel bebas dalam model. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain yang belum/tidak dimasukkan dalam model. Nilai koefisien determinan antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinan yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinan yang mendekati 1 (satu)

berarti variabel-variabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinan adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap penambahan satu variabel independen pasti akan meningkatkan koefisien determinan, tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Pengujian secara Ekonometrik (Orde II)

Pengujian secara Ekonometrik biasanya disebut juga dengan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi , variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residul berdistribusi normal atau tidak dengan analisis grafis dan uji statistik (Imam Ghozali, 2005).

Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal.

Ketentuan yang digunakan berdasarkan *Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)*

adalah sebagai berikut :

- a. Jika Probabilitas (*Asymp.sig*) $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.
- b. Jika Probabilitas (*Asymp.sig*) $> 0,05$, maka data berdistribusi normal

b. Uji Heterokedasitas

Heterokedasitas adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya asumsi homokedasitas. Di dalam regresi linear berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased dan ewstimator) adalah $\text{var}(\mu_i) = \sigma^2$ yang mempunyai variasi yang sama (homokedasitas). Pada kasus lain dimana μ_i tidak konstan disebut heterokedasitas. Untuk mendeteksi keberadaan heterokedasitas dapat dilakukan melalui Park test (Uji Park). Uji ini terdapat 2 (dua) tahapan yaitu : pertama melaksanakan regresi OLS dengan tidak memandang persoalan heterokedasitas dan didapatkan nilai e_i , kedua melalui regresi sebagai berikut :

$$\text{Ln } e_i^2 = \alpha + \beta \text{ Ln } X_i + v_i$$

Jika nilai β signifikan secara statistik, maka data terdapat heterokedasitas, jika tidak signifikan maka asumsi homokedasitas dapat diterima.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti data time series) atau ruang (seperti data cross section). Uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya autokorelasi

yaitu uji Durbin Watson (DW). Uji Durbin Watson dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati, 1995) :

1. Regres model lengkap untuk mendapatkan nilai residual
2. Hitung d (Durbin Watson statistik) dengan rumus :

$$d = \frac{\sum (e_n - e_{n-1})^2}{\sum e_n^2} \dots\dots\dots (3.9)$$

3. Hasil rumus tersebut (nilai d statistik) kemudian dibandingkan dengan nilai d tabel Durbin Watson. Di dalam tabel dimuat 2 nilai, yaitu nilai batas atas (du) dan nilai batas bawah (dl) untuk berbagai nilai n dan k. Di dalam model tidak terdapat autokorelasi jika nilai d statistik pada taraf signifikan (α) 5 % terletak di dalam daerah penerimaan.

d. Uji Multikolinearitas

1. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Pada kasus multikolinearitas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel bebas dalam model.
2. Metode yang digunakan dalam uji multikolinearitas ini adalah metode Klein dan kesepakatan Gujarati terhadap nilai korelasi antar variabel, yaitu dengan perbandingan antara R^2 penyesuaian Adjusted R^2 hasil regresi antar variabel bebas. Kemungkinan adanya multikolinearitas apabila Adjusted R^2 model uji variabel bebas dari Adjusted R^2 model utama.

Indikasi lain terdapat gejala multikolinaritas adalah dengan menggunakan *correlation matrices*, dimana apabila *correlation matrices* lebih besar daripada 0,8 berarti terdapat gejala multikolinaritas, dan sebaliknya.

3.3.3 Metode Perhitungan terhadap Pengeluaran Pemerintah

Beberapa perhitungan yang digunakan untuk menganalisis pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Proporsi jenis-jenis pengeluaran, dihitung dengan formula :

$$\frac{Xi_t}{\sum X_t} \times 100 \dots\dots\dots(3.10)$$

Dimana : Xi_t adalah jumlah pengeluaran jenis i pada tahun t

$\sum X_t$ adalah total pengeluaran pada tahun t

2. Pertumbuhan jenis-jenis pengeluaran, dihitung dengan formula :

$$\frac{Xi_t - Xi_{(t-1)}}{Xi_{(t-1)}} \times 100 \dots\dots\dots(3.11)$$

Dimana : Xi_t adalah jumlah pengeluaran jenis i pada tahun t

$Xi_{(t-1)}$ adalah jumlah pengeluaran jenis i pada tahun t-1

3.4 Definisi operasional variabel

Variabel yang dianalisis meliputi variabel-variabel yang dipilih dengan pengertian dasar atau konsep operasional sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi (Ynt), variabel dependen. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh

berbagai unit produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang digambarkan dalam PDRB atas dasar harga konstan 1993 karena data ini menunjukkan pertumbuhan riil daerah.

2. Belanja rutin (G). variabel independen. Yang dimaksud belanja rutin dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi pengeluaran rutin yang didanai dan tercantum dalam APBD Kota Semarang, dinyatakan dalam satuan nilai rupiah.
3. Belanja pembangunan (IG), Variabel Independen. Yang dimaksud belanja pembangunan dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi pengeluaran pembangunan yang didanai dan tercantum dalam APBD Kota Semarang dinyatakan dalam satuan nilai rupiah.
4. Investasi Swasta (IP), variabel independen. Investasi swasta dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi investasi penanaman modal yang telah mendapat SPT (Surat Persetujuan Tetap) di Kota Semarang, dinyatakan dalam satuan nilai rupiah.
5. Angkatan Kerja (L). Yang dimaksud angkatan kerja dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk usia produktif kerja yang bekerja pada semua sektor lapangan usaha, dinyatakan dalam satuan orang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Letak Geografis

Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, terletak antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Kota Semarang di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai 13,6 Km² (Kota Semarang Dalam Angka 2003).

Secara Geografis, Kota Semarang juga menjadi salah satu pintu gerbang Propinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Emas yang mana dalam kerangka otonomi daerah aset daerah ini bisa menambah pemasukan kas misalnya dari pajak penggunaan air bawah tanah dan retribusi keluar masuk-keluar wilayah bandara maupun pelabuhan.

Tabel 4.1
Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Batas Wilayah	
	Letak Lintang	Keterangan
Sebelah Utara	6°50' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7°10' LS	Kabupaten Semarang
Sebelah Barat	109°35' BT	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	110°50' BT	Kabupaten Demak

Sumber : BPS Kota Semarang 2003

4.2. Luas dan Pembagian Wilayah

Secara Administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km² dimana dari luas yang ada terdiri dari 36,13 Km² (9,75%) tanah sawah dan 33,46 Km² (90,25 %) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (55,37 %) sedangkan lahan kering yang ada sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar yaitu sebesar 41,47 % dari total lahan bukan sawah.

Tabel 4.2
Luas Kecamatan dan Persentase Luas Tanah Terhadap Luas Kota Semarang Tahun 2003 dalam hektar

No	Kecamatan	Luas Tanah	% THD Luas Kota
1.	Mijen	6.215,25	16,63
2.	Gunung Pati	5.399,09	14,45
3.	Banyumanik	2.153,06	6,72
4.	Gajah Mungkur	764,98	2,05
5.	Semarang Selatan	848,05	2,27
6.	Candisari	555,51	1,49
7.	Tembalang	4.420	11,83
8.	Pedurungan	2.072	5,54
9.	Genuk	2.738,44	7,33
10.	Gayamsari	549,47	1,47
11.	Semarang Timur	770,25	2,06
12.	Semarang Utara	1.133,28	3,03
13.	Semarang Tengah	604,99	1,62
14.	Semarang Barat	2.386,71	6,39
15.	Tugu	3.129,34	8,37
16.	Ngaliyan	3.269,97	8,75
Jumlah		37.370,39	100

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2003

4.3. Perkembangan PDRB Kota Semarang

Salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Di dalam analisis PDRB yang sering digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan dimana data tersebut sudah memperhitungkan unsur nilai inflasi, sehingga mendekati kebenaran.

4.3.1 Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang

Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang ada, akan semakin besar PDRB dan PAD suatu daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Jawa Tengah yang membaik, maka kinerja ekonomi Kota Semarang pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 4,63 %. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 dan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Semarang Tahun 1982-2003
(dalam rupiah)

No	Tahun	PDRB Konstan	Pertumbuhan
1	1982	246637860000	-
2	1983	272666500000	10,55
3	1984	321423012000	17,88
4	1985	328130152000	2,09
5	1986	723097417000	120,37
6	1987	794961855000	9,94
7	1988	894921463000	12,57
8	1989	986333372000	10,21
9	1990	1107945418000	12,33
10	1991	1242631020000	12,16
11	1992	1407168989000	13,24
12	1993	3791256158000	169,42
13	1994	4206910320000	10,96
14	1995	4682001840000	11,29
15	1996	5279973863000	12,77
16	1997	5793806963000	9,73
17	1998	4737995923000	-18,22
18	1999	4899241881000	3,40
19	2000	5142532904000	4,97
20	2001	5405239000000	5,11
21	2002	5626855000000	4,10
22	2003	5887162000000	4,63

Sumber : BPS Kota Semarang 2003

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa pada tahun 1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia ternyata juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang mana mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar -18,2 %. Namun pada tahun 2001 pertumbuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,11 % dan tahun 2003 mencapai 4,63 % hal tersebut cukup beralasan mengingat perjalanan perekonomian yang relatif terus membaik.

4.4. Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengumpulkan dana dalam upaya membiayai pengeluaran yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Pertama dapat diperoleh dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD); kedua dari bagi hasil pajak/non pajak; ketiga adalah dari sumbangan dan bantuan; dan keempat berasal dari penerimaan pembangunan yang berasal dari pinjaman dan digunakan untuk belanja pembangunan.

Sejak awal pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Semarang mencoba untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem *Double Entry* dimana dalam sistem ini masing-masing bidang pemerintahan dan perangkat daerah melakukan pembukuan atas pengelolaan keuangannya. Dengan sistem ini diharapkan akan memudahkan kontrol terhadap pos-pos pengeluaran dimasing-masing lini. Neraca yang ada tersebut bisa digunakan untuk memacu peningkatan pendapatan sekaligus menekan pengeluaran untuk pos-pos yang sebelumnya dinilai boros.

4.5 Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah.

Pembahasan mengenai perkembangan alokasi pengeluaran pemerintah dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pertumbuhan serta proporsi dapat memberikan suatu petunjuk secara umum perihal bagaimana kebijakan pengeluaran pemerintah yang telah dijalankan selama kurun waktu pengamatan.

Hasil perhitungan mengenai proporsi ditunjukkan dalam Tabel 4.4 dan Tabel 4.5

berikut :

Tabel 4.4
Proporsi Jenis-jenis Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang
Tahun 1982 sampai dengan 1993

No	Realisasi Pengeluaran	TAHUN										
		1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1993
	Pengeluaran Rutin											
1	Belanja Pegawai	20,23	19,59	19,57	17,09	20,73	20,84	20,43	22,59	21,57	17,09	23,73
2	Belanja Barang	5,33	6,74	7,25	7,25	7,54	7,61	6,53	7,74	7,49	7,25	8,54
3	Biaya Pemeliharaan	2,93	3,49	1,74	1,26	1,47	1,59	2,83	3,49	1,74	1,26	1,47
4	Belanja Perj.Dinas	0,68	0,18	0,97	0,73	0,78	0,63	0,17	0,18	0,27	0,73	0,78
5	Belanja lain-lain	4,19	5,47	5,84	12	7,48	8,09	5,29	5,67	6,54	12,34	8,48
6	Angsuran Pinjaman	1,98	4,17	2,2	3,24	5,26	4,87	2,34	4,17	4,91	3,24	5,16
7	Ganjaran, Subsidi, Sumbangan kepada daerah bawahan	2,18	1,67	1,55	1,53	0,35	0,33	1,63	1,67	1,55	1,43	0,35
8	Pengeluaran tidak termasuk bagian lain	5,1	1,04	1,1	1,02	2,44	2,12	7,30	1,04	1,10	1,07	2,44
9	Pengeluaran Tak Tersangka	0		3,02	0,09	0,13	0,1			5,13	0,09	0,13
	Jumlah Pengeluaran Rutin	42,62	42,35	43,24	44,21	46,18	46,18	46,52	46,55	50,32	44,51	51,08
	Pengeluaran Pembangunan											
11	Industri	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
12	Pertanian dan Kehutanan	0,17	0,21	0,3	0,25	0,17	0,11	0,17	0,21	0,30	0,25	0,17
13	Sumber Daya Air dan Irigasi	0						0,00				
14	Tenaga Kerja	0,08	0,09	1,09	0,13	0,1	0,09	0,08	0,09	0,09	0,13	0,10
15	Perdag., Pengemb.USaha Daerah, Keu.Daerah dan Kop.	2,82	6	0,62	0,91	1,06	1,16	1,82	6,00	0,62	0,91	1,06
16	Transportasi	18,98	23,75	24,31	19,33	15,07	15,16	18,52	22,75	24,31	19,33	14,07
17	Pertambangan dan energi	0,58	0,5	1,96	0,83	0,44	1,48	0,58	0,50	0,96	0,83	0,44
18	Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	0						0,00				
19	Pembangunan Daerah dan Pemukiman	3,75	2,51	3,9	3,2	4,49	4,15	2,65	2,51	2,90	3,20	3,49
20	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1,69	1,05	0,78	0,32	0,38	1,32	1,31	1,05	0,78	0,32	0,38
21	Pendidikan Kebud.Nasional, Keperc. thd Tuhan YME	2,54	3,39	5,99	10,29	9,25	7,08	2,54	2,39	5,99	10,09	9,37
22	Kependudukan keluarga sejahtera											
23	Kes, Kesejah.sosial, Peranan Wanita dan Anak Remaja	0,74	1,04	2,81	1,44	3,4	2,39	0,74	1,04	1,81	1,44	2,37
24	Sektor Perumahan dan Pemukiman	19,89	12,38	4,62	0,98	5,9	0,62	19,75	12,20	3,62	0,98	5,90
25	Agama	0,22	0,26	0,49	0,72	0,04	2,97	0,22	0,26	0,49	0,52	0,04
26	IPTEK	0,87	0,25	0,64	0,42	1,45	0,44	0,87	0,25	0,64	0,52	0,45
27	Hukum	0,03	0,04	1,13	0,13	0,22	0,23	0,03	0,04	0,13	0,13	0,22
28	Aparatur, Pemerintahan dan Pengawasan	4,07	5,99	6,69	16,36	10,27	15,75	4,07	3,99	6,69	16,36	10,27
29	Politik, Penerangan Komunikasi dan Media Masa	0,83	0,06	0,11	0,1	1,25	0,55	0,03	0,06	0,11	0,10	0,25
30	Keamanan dan Ketertiban Umum	0,1	0,11	1,22	0,36	0,3	0,15	0,10	0,11	0,22	0,36	0,30
31	Subsidi kepada daerah bawahan											
	Jumlah Pengeluaran Pembangunan	57,38	57,65	56,68	55,79	53,82	53,68	53,48	53,45	49,68	55,49	48,92
	Jumlah Total	100										

Sumber : BPS Kota Semarang dalam Angka 2003 (diolah)

Tabel 4.5
Proporsi Jenis-jenis Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang
Tahun 1994 sampai dengan 2003

No	Realisasi Pengeluaran	TAHUN										
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
	Pengeluaran Rutin											
1	Belanja Pegawai	21,16	17,57	10,03	20,40	31,95	42,08	42,78	58,68	58,98	58,98	26,65
2	Belanja Barang	9,25	8,85	5,35	8,64	7,09	10,15	12,71	11,35	11,39	11,59	8,55
3	Biaya Pemeliharaan	1,85	1,65	0,92	1,44	1,34	1,64	1,57	1,57	1,57	1,57	1,74
4	Belanja Perj.Dinas	0,54	0,55	0,35	0,35	0,23	0,29	0,24	0,22	0,22	0,22	0,39
5	Belanja lain-lain	9,85	9,93	5,75	13,53	11,89	15,69	4,42	3,14	3,61	3,71	9,04
6	Angsuran Pinjaman	7,90	7,70	4,50	6,91	5,98	6,33	6,55	4,20	4,2	4,2	5,34
7	Ganjaran, Subsidi, Sumbangan kepada daerah bawahan	0,29	0,16	0,15	0,29	0,20	0,24	0,19	0,08	0,08	0,08	0,61
8	Pengeluaran tidak termasuk bagian lain	2,14	1,86	0,82	1,97	1,11	2,66	0,58	0,64	0,64	0,69	1,96
9	Pengeluaran Tak Tersangka	0,03	0,01	0,01	0,04	0,01	0,05	0,06	0,33	0,33	0,35	0,43
	Jumlah Pengeluaran Rutin	53,01	48,29	27,88	53,56	59,79	79,14	69,12	80,21	81,02	81,39	54,71
	Pengeluaran Pembangunan											
11	Industri	0,02	0,02	0,01	0,03	0,04	0,06	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
12	Pertanian dan Kehutanan	0,67	0,10	0,16	0,20	0,27	0,29	0,19	0,23	0,23	0,23	0,24
13	Sumber Daya Air dan Irigasi								0,05	0,05	0,05	0,00
14	Tenaga Kerja	0,11	0,10	0,04	0,03	0,22	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,10
15	Perdag., Pengemb.USaha Daerah, Keu.Daerah dan Kop.	2,05	2,43	0,76	2,10	0,51	1,30	1,23	0,98	0,88	0,88	1,64
16	Transportasi	13,65	17,33	7,42	9,57	2,33	1,91	10,98	4,51	4,51	4,51	12,85
17	Pertambangan dan energi	0,69	0,28	0,43	0,66	0,30	0,50					0,47
18	Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah		0,15	0,09	0,30	0,06	0,12	0,13	0,08	0,12	0,12	0,07
19	Pembangunan Daerah dan Pemukiman	7,92	5,93	2,65	3,10	1,44	1,14	3,36	2,40	2,4	2,32	3,27
20	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	0,50	0,90	0,44	0,82	0,46	1,63	0,27	0,31	0,31	0,31	0,68
21	Pendidikan Kebud.Nasional, Keperc. thd Tuhan YME	3,57	2,54	3,12	2,47	2,34	1,79	1,80	1,67	1,67	1,65	3,98
22	Kependudukan keluarga sejahtera		0,08	0,32	0,75	0,06	0,12	0,05	0,06	0,16	0,16	0,10
23	Kes, Kesejah.sosial, Peranan Wanita dan Anak Remaja	3,11	1,80	1,23	2,13	0,58	1,38	2,88	1,16	1,16	1,11	1,72
24	Sektor Perumahan dan Pemukiman	5,56	9,41	5,24	15,90	3,56	3,73	6,50	4,69	3,69	3,65	6,98
25	Agama	0,39	0,40	0,26	0,49	0,22	0,27	0,18	0,34	0,34	0,31	0,32
26	IPTEK	0,88	3,43	2,74	2,41	0,17	0,96	0,95	0,38	0,18	0,17	1,08
27	Hukum	0,07	0,05	0,02	0,08	0,04	0,07	0,05	0,04	0,14	0,14	0,08
28	Aparatur, Pemerintahan dan Pengawasan	7,18	6,05	3,10	4,38	3,05	4,89	2,05	2,57	2,67	2,54	6,39
29	Politik, Penerangan Komunikasi dan Media Masa	0,23	0,58	0,17	0,38	0,13	0,29	0,11	0,10	0,15	0,15	0,22
30	Keamanan dan Ketertiban Umum	0,11	0,13	0,19	0,14	0,03	0,29	0,02	0,04	0,14	0,12	0,16
31	Subsidi kepada daerah bawahan	0,29		43,73	0,50	24,41						4,92
	Jumlah Pengeluaran Pembangunan	46,99	51,71	72,12	46,44	40,21	20,86	30,88	19,79	18,98	18,61	45,29
	Jumlah Total	100										

Sumber : BPS Kota Semarang dalam Angka 2003 (diolah)

Perhitungan mengenai perkembangan Proporsi jenis-jenis pengeluaran menunjukkan adanya kecenderungan yang tetap dari tahun pengamatan 1982

sampai dengan 2003. Dengan demikian nilai rata-rata proporsi untuk tiap-tiap jenis pengeluaran cukup berarti untuk dijadikan dasar pembahasan.

Proporsi pengeluaran rutin rata-rata sebesar 54,71 %, proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 81,39 %. Sementara rata-rata proporsi pengeluaran pembangunan adalah 45,29 % dengan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 1996 Sebesar 72,12 %. Tingginya proporsi pengeluaran rutin terutama didukung oleh pos belanja pegawai, belanja lain-lain dan belanja barang.

Belanja pegawai rata-rata proporsinya adalah 26,65 %, tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 58,98 %. Belanja lain-lain rata-rata sebesar 9,04 % dengan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 1999. Belanja barang rata-rata sebesar 8,55 %, yang tertinggi pada tahun 2000 sebesar 12,71 %.

Untuk pengeluaran pembangunan sektor-sektor yang memiliki angka rata-rata proporsi tinggi adalah sektor transportasi sebesar 12,85 %. Kemudian sektor perumahan dan pemukiman sebesar 6,98 % dan sektor aparatur, pemerintahan dan pengawasan sebesar 6,39 %.

Secara keseluruhan jenis pengeluaran dengan rata-rata proporsi tertinggi diantaranya adalah belanja pegawai (58,68%), belanja lain-lain (9,04 %), belanja barang (8,55%), pengeluaran sektor transportasi (12,85 %), sektor perumahan dan pemukiman (6,98%) dan sektor aparatur, pemerintahan dan pengawasan (6,39 %). Pola ini berjalan tetap selama tahun pengamatan dengan beberapa perbedaan nilai proporsi, namun dengan urutan yang nyaris sama terus menerus dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2003.

Pertumbuhan tiap-tiap jenis pengeluaran pemerintah daerah memberikan petunjuk lebih jauh mengenai kebijakan pengeluaran pemerintah daerah. Perhitungan yang telah dilakukan ternyata menunjukkan bahwa angka-angka pertumbuhan untuk sebagian besar jenis pengeluaran sangat fluktuatif.

Jenis pengeluaran dengan angka rata-rata pertumbuhan yang cukup berarti untuk pengeluaran rutin adalah pengeluaran tak tersangka (112 %), belanja perjalanan dinas (37,9 %) dan belanja pegawai (37 %). Untuk pertumbuhan pengeluaran pembangunan angka pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi terdapat pada sektor transportasi (110,9%), perumahan dan pemukiman (109,2%) dan sektor keamanan dan ketertiban umum (102,6%). Pertumbuhan pengeluaran tak tersangka yang cukup tinggi didorong oleh tingginya pertumbuhan pada tahun 1997, 1999 dan 2001. Sementara untuk pengeluaran sektor transportasi, rata-rata pertumbuhan yang tinggi disebabkan tingginya pertumbuhan pada tahun 2001. Hasil perhitungan selengkapnya ditunjukkan dalam Tabel 4.6 dan Tabel 4.7

Tabel 4.6
Pertumbuhan jenis pengeluaran
pemerintah daerah Kota Semarang Tahun 1982 s.d 1993

No	Realisasi Pengeluaran	TAHUN										
		1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1993
	Pengeluaran Rutin	3,28	4,22	4,01	3,55	3,33	3,22	3,25	3,9	24,1	20,3	7,4
1	Belanja Pegawai	10,5	10,7	11,8	12,1	13,2	14,2	14,9	14,8	9,6	7,8	29,9
2	Belanja Barang	4,8	5,1	5,3	5,6	6,2	6,01	6,53	23,1	11,2	31,5	10,2
3	Biaya Pemeliharaan	21,3	21,6	22,5	22,4	23,5	27,8	28,3	28,0	-42,6	-1,7	9,2
4	Belanja Perj.Dinas	8,1	8,4	8,7	9,01	9,58	10,64	11,17	11,5	76,9	263,6	0,0
5	Belanja lain-lain	2,54	2,86	3,01	3,22	4,38	5,19	5,29	11,1	32,6	156,6	-35,7
6	Angsuran Pinjaman	63,82	64,01	64,22	66,31	75,24	89,5	90,1	84,8	35,	-10,1	48,8
7	Ganjaran, Subsidi, Sumbangan kepada daerah bawahan	5,6	5,7	5,9	6,1	6,2	6,7	6,3	6,2	6,7	25,3	-77,1
8	Pengeluaran tidak termasuk bagian lain	90,3	90,8	91,0	91,3	91,8	92,1	92,3	-85,1	21,0	31,9	114,4
9	Pengeluaran Tak Tersangka										-97,5	36,6
	Pengeluaran Pembangunan	3,22	3,54	3,28	4,55	4,34	4,21	3,65	3,7	6,7	51,9	-17,5
11	Industri									38,4	44,4	34,6
12	Pertanian dan Kehutanan	19,1	19,3	19,6	20,1	20,3	21,4	25,1	25,5	68,9	12,4	-36,7
13	Sumber Daya Air dan Irigasi											
14	Tenaga Kerja	14,01	14,2	14,5	14,8	15,7	15,3	15,6	15,8	14,0	85,8	-24,4
15	Perdag., Pengemb.USaha Daerah, Keu.Daerah dan Kop.	9,6	9,7	9,8	10,1	10,8	11,7	127	242,0	-88,1	100,3	9,0
16	Transportasi	10,1	10,5	11,7	12,1	12,8	13,5	26,3	27,5	22,7	8,1	-31,9
17	Pertambangan dan energi	1,6	1,1	1,02	1,4	1,3	1,9	2,3	-10,9	121,8	17,4	-50,5
18	Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah											
19	Pembangunan Daerah dan Pemukiman	2,03	2,2	2,4	2,6	2,1	2,3	1,7	-1,5	32,6	50,4	2,0
20	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	2,14	3,03	3,1	3,2	3,3	3,4	3,8	-17,1	-13,8	-44,7	11,2
21	Pendidikan Kebud.Nasional, Keperc. thd Tuhan YME	1,8	2,1	2,3	2,2	2,6	2,7	2,6	-2,3	188,4	129,0	-13,1
22	Kependudukan keluarga sejahtera											
23	Kes, Kesejah.sosial, Peranan Wanita dan Anak Remaja	29,5	29,8	30,1	31,5	33,7	34,1	35,4	46,2	99,5	8,4	53,9
24	Sektor Perumahan dan Pemukiman	1,7	1,9	2,01	2,2	2,4	2,6	2,7	-35,8	-65,8	-63,2	463,6
25	Agama	19,01	19,2	19,4	19,7	20,1	20,3	21,4	26,0	111,9	45,1	-91,9
26	IPTEK	11,7	12,1	12,8	12,11	2,12	2,43	1,87	-70,7	197,7	10,9	-18,2
27	Hukum	24,1	24,3	26,7	26,8	27,1	27,3	29,7	34,8	272,4	29,4	62,3
28	Aparatur, Pemerintahan dan Pengawasan	1,24	1,55	2,03	2,1	2,3	2,5	1,3	1,7	92,6	232,9	-41,2
29	Politik, Penerangan Komunikasi dan Media Masa	9,1	9,4	10,7	11,1	11,5	12,3	11,2	105,0	112,2	27,4	133,0
30	Keamanan dan Ketertiban Umum	8,54	9,02	9,1	9,4	9,7	9,8	10,4	12,5	133,4	123,5	-22,9

Sumber : BPS Kota Semarang dalam Angka 2003 (diolah)

Tabel 4.7
Pertumbuhan jenis pengeluaran
pemerintah daerah Kota Semarang Tahun 1994 s.d 2003

No	Realisasi Pengeluaran	TAHUN										Rata-rata
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
	Pengeluaran Rutin	12.8	20.3	17.4	36.9	43.66	35.5	-9.5	135.7	58,6	42,3	30.6
1	Belanja Pegawai	9.8	9.7	16.2	44.9	101.5	34.8	5.3	178.6	13,2	14,2	37.0
2	Belanja Barang	26.1	26.3	23.1	14.9	5.6	46.6	29.6	81.3	6,2	6,01	25.4
3	Biaya Pemeliharaan	38.7	18.1	12.9	11.6	19.4	25.8	-0.8	102.6	23,5	27,8	20.0
4	Belanja Perj.Dinas	1.6	34.7	29.0	-27.7	-15.3	27.6	-13.2	87.5	9,58	10,64	37.9
5	Belanja lain-lain	-16.6	33.2	17.7	67.7	13.0	35.1	-70.7	44.3	4,38	5,19	36.2
6	Angsuran Pinjaman	93.4	28.8	18.8	9.3	11.3	8.5	7.1	30.2	75,24	89,5	29.2
7	Ganjaran, Subsidi, Sumbangan kepada daerah bawahan	5.0	-28.0	89.7	42.4	-14.2	25.3	-15.7	-19.9	6,2	6,7	6.2
8	Pengeluaran tidak termasuk bagian lain	-5.4	14.7	-9.9	70.5	-27.6	146.4	-77.2	123.8	91,8	92,1	33.5
9	Pengeluaran Tak Tersangka	-63.6	-40.4	13.2	222.5	-64.6	466.4	16.7	985.1	102,1	98,75	112.
	Pengeluaran Pembangunan	27.4	45.4	183.8	-54.1	11.4	-46.8	53.4	30.1			19.7
11	Industri	-14.2	33.3			87.5	65.3	-54.7	113.3	20,3	21,4	30.9
12	Pertanian dan Kehutanan	633.3	-79.6	213.4	-8.1	67.8	11.8	-33.8	155.7	87,1	79,3	80.4
13	Sumber Daya Air dan Irigasi											
14	Tenaga Kerja	43.1	17.1	-12.3	-54.9	949.3	-55.2	10.1	197.9	10,8	11,7	91.6
15	Perdag., Pengemb.USaha Daerah, Keu.Daerah dan Kop.	109.7	56.7	-36.1	96.2	-68.5	160.0	-2.3	62.4	12,8	13,5	52.6
16	Transportasi	27.2	33.9	33.7	35.5	-43.3	28.0	-31.2	285.4	2,12	2,43	110.8
17	Pertambangan dan energi	71.0	-46.4	214.6	8.7	-42.3	73.7					30.6
18	Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah			19.5	146.7	-72.7	98.2	12.6	27.6	2,1	2,3	16.8
19	Pembangunan Daerah dan Pemukiman	200.1	-0.9	-9.2	-16.5	-40.1	-19.1	205.9	44.8	3,3	3,4	19.8
20	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	84.5	136.7	-1.1	33.8	-27.8	263.6	-82.5	132.4	2,6	2,7	43.6
21	Pendidikan Kebud.Nasional, Keperc. thd Tuhan YME	-30.0	-6.0	150.0	-43.6	22.0	-21.5	3.7	89.0	77,1	74,2	34.2
22	Kependudukan keluarga sejahtera			713.0	67.1	-90.2	117.8	-61.5	160.8	33,7	34,1	74.5
23	Kes. Kesejah.sosial, Peranan Wanita dan Anak Remaja	55.3	-23.3	39.5	23.2	-65.2	145.9	115.8	-18.0	2,4	2,6	30.3
24	Sektor Perumahan dan Pemukiman	972.3	123.8	13.3	115.9	-71.1	7.4	80.3	46.4	20,1	20,3	109.2
25	Agama	23.6	67.7	-12.8	-8.0	-68.6	-16.4	496.6	-16.4	1,3	1,9	1.1
26	IPTEK	138.1	412.8	62.8	-37.4	-90.9	479.7	2.6	-19.1	27,1	27,3	83.8
27	Hukum	-30.0	4.7	-9.0	125.0	-36.0	103.9	-29.9	48.7	2,3	2,5	44.0
28	Aparatur, Pemerintahan dan Pengawasan	-41.9	11.4	4.2	0.7	-10.4	64.2	-56.4	153.7	11,5	12,3	42.4
29	Politik, Penerangan Komunikasi dan Media Masa	-49.6	231.0	-41.6	62.7	-55.6	124.3	-60.0	75.5	9,7	9,8	69.3
30	Keamanan dan Ketertiban Umum	-13.4	62.2	191.9	-48.3	-67.7	775.0	-91.2	224.7	101,2	8,95	102.6

Sumber : BPS Kota Semarang dalam Angka 2003 (diolah)

Beberapa hal yang menarik untuk menjadi perhatian lebih lanjut dari hasil perhitungan proporsi dan pertumbuhan jenis-jenis pengeluaran pemerintah adalah :

1. Angka-angka yang diperoleh menunjukkan sangat fluktuatifnya angka pertumbuhan untuk masing-masing jenis pengeluaran, meskipun dari segi proporsi cenderung untuk tetap dari tahun ke tahun;

2. Pos pengeluaran tak terduga perlu menjadi perhatian, karena meskipun dari segi proporsi dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang cukup berarti, namun dari segi pertumbuhannya mencatat angka yang sangat tinggi yaitu rata-rata 112% ;
3. Pos belanja pegawai dan belanja lain-lain meskipun dari segi pertumbuhannya ada kecenderungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun secara rata-rata masih relatif tinggi dan proporsinya juga tetap tinggi. Kedua pos ini dari segi proporsinya ternyata selalu menempati tempat tertinggi diantara jenis-jenis pengeluaran lainnya.

Sebagai sebuah pendekatan sederhana terhadap upaya pemantauan kebijakan pengeluaran pemerintah daerah, perkembangan proporsi dan pertumbuhan jenis-jenis pengeluaran memberikan petunjuk mengenai bagaimana kebijakan pengeluaran pemerintah daerah Kota Semarang telah dilakukan selama tahun pengamatan.

4.6. Perkembangan Penduduk dan Tenaga Kerja Kota Semarang

4.6.1 Perkembangan Penduduk Kota Semarang

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2003, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.978.193 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2003 sebesar 2,09 %. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, memberikan hasil yang nyata.

Sekitar 71,77 % penduduk Kota Semarang berumur produktif (15-64 tahun), sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) pada tahun 2003 sebesar 2,23 yang berarti 1 orang penduduk usia produktif menanggung 2-3 orang penduduk usia tidak produktif.

Dalam kurun waktu 5 tahun (1999-2003), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah terpadat, sedangkan kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah.

4.6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Semarang

Sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan penduduk, untuk sektor tenaga kerja ini diprioritaskan pada penciptaan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun ke atas dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai Bukan Angkatan Kerja, yaitu mereka yang kegiatan

utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan fisik (cacat).

Pada tahun 2003, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Semarang, yaitu perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 49,85 %. Sedangkan tingkat kesempatan kerja, yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja pada tahun 2003 adalah sebesar 80,4 %. Berdasarkan tahun pengamatan penelitian, pertumbuhan angkatan kerja berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,57 %. Pertumbuhan angkatan kerja ini harus dapat diantisipasi oleh pemerintah Kota Semarang dengan harapan agar angkatan kerja yang di Kota Semarang dapat diserap oleh pasar kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Dari data BPS Kota Semarang, mata pencaharian utama yang ada bergerak di Jasa dan lainnya sebesar 15,72%, dan berturut-turut disusul Buruh Industri 13,05%, buruh bangunan 9,60 %, PNS/ABRI 6,36 % serta Petani sebesar 1,61%.

Tabel 4.8
Banyaknya Angkatan Kerja
di Kota Semarang Tahun 1999-2003 (dalam satuan orang)

No	Tahun	Angkatan Kerja		Jumlah	Pertumbuhan Angkatan Kerja
		Yang Bekerja	Yang Tidak Bekerja		
1	1982	70869	86.756	157.625	4,87 %
2	1983	78423	87.214	165.637	5,08 %
3	1984	89678	94.227	183.905	11,03 %
4	1985	97191	94.321	191.512	4,14 %
5	1986	154925	143.227	298.152	55,68 %
6	1987	161415	157.246	318.661	6,88 %
7	1988	176620	152.297	328.917	3,22 %
8	1989	182551	154.241	336.792	2,39 %
9	1990	212006	162.327	374.333	11,15 %
10	1991	232631	173.246	405.877	8,43 %
11	1992	378976	163.554	542.530	33,67 %
12	1993	274642	171.264	445.906	-17,81 %
13	1994	577434	161.247	738.681	65,66 %
14	1995	582765	164.328	747.093	1,14 %
15	1996	588086	171.221	759.307	1,63 %
16	1997	601318	173.231	774.549	2,01 %
17	1998	649423	185.127	834.550	7,75 %
18	1999	743073	187.022	930.095	11,45 %
19	2000	555697	191.094	746.791	-19,71 %
20	2001	615426	162.365	777.791	4,15 %
21	2002	672925	165.498	838.423	7,80 %
22	2003	707115	171.328	878.443	4,77 %
Rata – rata Pertumbuhan					9,57 %

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2003 (diolah)

4.7. Perkembangan Investasi Swasta di Kota Semarang

Investasi merupakan salah satu parameter keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena investasi memiliki *multiplier effect* yang mencakup penyerapan tenaga kerja, yang secara tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat dan makin bertumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar lokasi

bangunan industri atau proyek investasi lainnya. Hal inilah yang memacu pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pertumbuhannya melalui suntikan modal berupa investasi baik yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN.

Posisi Kota Semarang sebagai sentra industri utama Provinsi Jawa Tengah, disamping sebagai ibu kota provinsi, membuat Kota Semarang berkepentingan dengan masuknya investasi baru, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Badan Kerjasama Penanaman Modal dan Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah (BKPM-PBA) Kota Semarang.

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa perkembangan investasi selama tahun pengamatan rata-rata sebesar 26,52 %. Besarnya perkembangan investasi swasta ini diharapkan dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah Kota Semarang sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Semarang.

Kinerja investasi di Kota Semarang terlepas dari berbagai kekurangannya ternyata jauh mengungguli Kabupaten/Kota lain di Jateng. Hal ini disebabkan oleh sistem yang memudahkan investor dalam menanamkan modalnya melalui mekanisme satu atap, disamping hal tersebut Kota Semarang yang diuntungkan dengan letak geografisnya sebagai Kota Metropolitan di jantung Pulau Jawa sehingga menjadi simpul jasa dan distribusi yang didukung dengan infrastruktur fisik termasuk sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Penanaman modal yang dilakukan saat ini juga mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk mengembangkan kawasan-kawasan industri.

Perencanaan investasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang di masa mendatang akan diarahkan untuk mendukung Kota Semarang sebagai Kota Jasa. Oleh karena itu, investasi berbentuk jasa seperti jasa pariwisata, perhotelan, *trading, packaging*, ekspor impor, perkantoran, perbankan dan keuangan akan diprioritaskan.

Tabel 4.9
Nilai Investasi PMA dan PMDN
di Kota Semarang Tahun 1982 – 2003
(dalam rupiah)

No	Tahun	Nilai Investasi	Pertumbuhan Investasi
1	1982	4.806.091.439	
2	1983	5.021.477.249	4,48 %
3	1984	5.176.784.771	3,09 %
4	1985	19.187.022.960	270,64 %
5	1986	14.503.415.350	-24,41 %
6	1987	22.566.447.130	55,59 %
7	1988	16.741.725.950	-25,81 %
8	1989	27.389.895.360	63,60 %
9	1990	33.672.590.330	22,94 %
10	1991	37.618.808.940	11,72 %
11	1992	44.975.781.820	19,56 %
12	1993	90.488.625.980	101,19 %
13	1994	113.112.643.000	25,00 %
14	1995	125.637.925.500	11,07 %
15	1996	125.743.505.700	0,08 %
16	1997	128.320.900.700	2,05 %
17	1998	125.485.995.500	-2,21 %
18	1999	103.934.839.900	-17,17 %
19	2000	110.345.258.400	6,17 %
20	2001	116.586.578.800	5,66 %
21	2002	126.548.313.900	8,54 %
22	2003	145.697.734.400	15,13 %
Rata-Rata Pertumbuhan Investasi			26,52 %

Sumber : BKPM-PBA Kota Semarang (2004)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bab ini akan membahas pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Secara deskriptif pemantauan terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah Kota Semarang diamati melalui perkembangan pengalokasian pengeluaran pemerintah (meliputi pertumbuhan dan proporsi tiap jenis pengeluaran dari tahun ke tahun). Secara kuantitatif akan digunakan pendekatan hasil perhitungan model regresi berganda, termasuk uji asumsi klasik dan uji statistik. Penggunaan model regresi berganda disini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan/pengaruh antara variabel dependen (PDRB) dengan variabel independen (belanja rutin, belanja pembangunan, investasi swasta dan tenaga kerja) serta untuk mengetahui sejauh mana besar dan arah dari hubungan variabel tersebut. Sedangkan analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat/derajat keeratan antara variabel yang ada. Untuk membantu pengolahan data, penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 11.5

5.1 Hasil Pengujian Regresi

Pengujian model regresi yang digunakan dalam penelitian ini akan sangat menentukan hasil analisis berkaitan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan kuantitatif. Namun demikian sebelum melakukan pengujian model regresi, maka perlu

dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sehingga model regresi yang diharapkan akan benar-benar sebagai suatu model regresi yang baik dan efisien dalam arti adanya ketepatan model yang digunakan.

5.1.1 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyakit-penyakit yang terdapat dalam model regresi seperti multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Apabila ada penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, maka uji t dan uji F yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik dapat membuat rancu kesimpulan yang diperoleh.

5.1.1.1 Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai-nilai korelasi antara variabel bebas = 0. Multikolinieritas dapat dilihat dengan membandingkan koefisien korelasi antar variabel independen (Kuncoro, 2001 : 114), jika korelasi antar dua variabel lebih besar daripada 0,8 maka multikolinieritas menjadi masalah serius.. Hasil pengolahan data dengan program SPSS 11.5 untuk uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Uji Multikolinieritas dengan melihat korelasi antar
Variabel independen

CORRELATIONS		LN TK	LN PEMB	LN INV	LN RUTIN
	LN TK	1,000	,233	-,361	-,414
	LN PEMB	,233	1,000	-,505	-,488
	LN INV	-,361	-,505	1,000	-,320
	LN RUTIN	-,414	-,488	-,320	1,000

Sumber : data primer yang diolah,2006

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas, karena korelasi antar variabel bebas tidak melebihi dari 0,8. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

5.1.1.2 Pengujian Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual tersebut tetap maka disebut homoskedastisitas. Namun jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat titik sebaran tertentu pada *scatterplot*, uji Park, uji Withe atau uji Glejser.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Park-test*. Park mengemukakan metode bahwa variance merupakan fungsi dari variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan :

$$\sigma^2_i = \alpha X_i \beta \dots\dots\dots (5.1)$$

Persamaan ini dijadikan linier dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi :

$$\text{Ln } \sigma^2_i = \alpha + \beta \text{Ln} X_i + v_i \dots\dots\dots (5.2)$$

Karena variance umumnya tidak diketahui, maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_t sebagai proksi, sehingga persamaan menjadi :

$$\ln U^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i \dots \dots \dots (5.3)$$

Setelah diperoleh hasil regresi maka dilihat signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka dapat diindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data dengan program SPSS 11.5 untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan *Park-Test*

VARIABEL	SIG.	ALPHA	KESIMPULAN
RUTIN	0,062	0,05	Bebas Heterokedastisitas
PEMB	0,895	0,05	Bebas Heterokedastisitas
INVESTASI	0,083	0,05	Bebas Heterokedastisitas
TK	0,552	0,05	Bebas Heterokedeastisitas

Sumber : data primer yang diolah,2006

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan metode *Park-Test* dapat terlihat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak ada sig. masing-masing variabel yang lebih kecil dari pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan *Park-Test*, data tidak terkena heteroskedastisitas .

5.1.1.3 Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara variabel pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dilihat dari Durbin Watson statistik. Dari hasil pengolahan data di tampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Uji Autokorelasi dengan *Durbin-Watson* Statistik
Model Summary^b

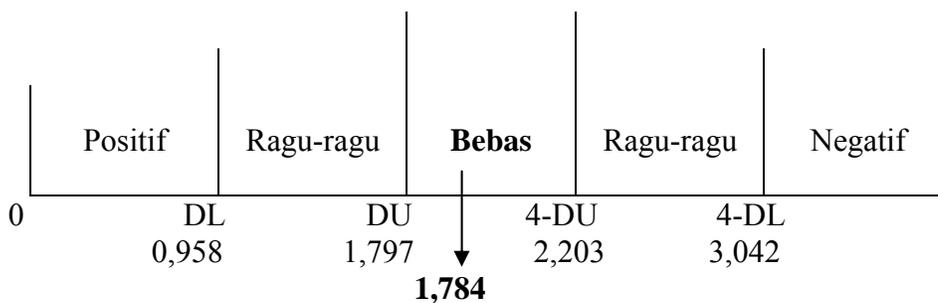
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,987 ^a	,974	,967	,20775987	1,784

a. Predictors: (Constant), LNTK, LNRUTIN, LNINVES, LNPEMB

b. Dependent Variable: LNPDRB

Hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai DW sebesar 1,764. Nilai tabel dengan menggunakan alpha 5 %, jumlah sampel 22 dan jumlah variabel independen 4, maka ditabel Durbin Watson akan didapat nilai dl = 0,958 dan du = 1,797.

Gambar 5.1
Kriteria pengambilan keputusan autokorelasi



Berdasarkan keterangan di atas, menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,784 dan berada pada daerah bebas autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi.

5.1.1.4 Uji Normalitas

Untuk mengetahui data yang dikumpulkan penulis termasuk data yang berdistribusi normal atau tidak, maka penulis melakukan pengujian data dengan menggunakan program SPSS 11.5 yang hasilnya dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4
Uji Normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*

VARIABEL	PROBABILITY	ALPHA	KESIMPULAN
Residual	0,724	0,05	Normal

Sumber : data primer yang diolah,2006

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* kriteria yang digunakan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* adalah dengan melihat probabilitas dengan ketentuan :

- a. Jika Probabilitas (*Asymp.sig*) $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.
- b. Jika Probabilitas (*Asymp.sig*) $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

Dari tabel di atas terlihat bahwa *probability* masing-masing variabel tidak ada yang signifikan atau lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa lolos uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov Test*.

5.1.2 Pengujian Statistik

Pengujian statistik dari model regresi meliputi uji signifikansi parameter individual (uji t), uji signifikansi simultan (uji F) dan koefisien determinasi) dapat dilihat pada Tabel 5.5

Tabel 5.5
Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	T Stat	Prob-Sig
Constant	11,154	5,811	,000*
Rutin	,156	1,930	,071**
Pembangunan	,147	1,356	,193
Investasi	,359	2,285	,035*
Angkatan Kerja	,176	1,431	,170
Adj R Square	0,967		
F-Stat	156,920		
Prob	0,000		
N	22		

Sumber : Lampiran 1

Keterangan :

* signifikan pada $\alpha = 5$ persen

** signifikan pada $\alpha = 10$ persen

$$LY_{nt} = 11,154 + 0,156 \text{ Blnj Rutin} + 0,147 \text{ Blnj Pemb} + 0,359 \text{ Investasi} + 0,176 \text{ Angk} \\ \text{Kerja} + \mu_t \dots\dots\dots (5.4)$$

Pada Tabel 5.5 koefisien variabel konstantanya 11,154 hal ini menunjukkan adanya indikasi pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 11,15 % apabila semua variabel bebas dianggap konstan. Variabel investasi swasta mempunyai nilai elastistas yang cukup tinggi sebesar 0,359 terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti bahwa investasi swasta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan variabel-variabel yang lainnya.

5.1.2.1 Uji Hipotesis

5.1.2.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian statistik maka dapat disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan pengujian terhadap hipotesis sebagai berikut :

1. H1 : Belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ($\alpha_4 > 0$)

Nilai signifikansi parameter variabel belanja rutin yang dihasilkan dalam analisis adalah 0,071 yang berarti lebih kecil daripada nilai $\alpha = 10\%$. Sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Dapat disimpulkan bahwa belanja pembangunan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel produk domestik regional bruto pada taraf kepercayaan 90 %.

2. H2 : Belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ($\alpha_3 > 0$)

Nilai signifikansi parameter variabel belanja pembangunan yang dihasilkan dalam analisis adalah 0,193 yang berarti lebih besar daripada nilai $\alpha = 0,05$. Sehingga menolak H_a dan menerima H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja pembangunan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel produk domestik regional bruto pada taraf kepercayaan 95 %.

3. H3 : Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ($\alpha_1 > 0$)

Nilai signifikansi parameter variabel investasi swasta yang dihasilkan dalam analisis adalah 0,035 yang berarti lebih kecil daripada nilai $\alpha = 0,05$. Berarti menerima H_a dan menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap variabel produk domestik regional bruto pada taraf kepercayaan 95%.

4. H4 : Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ($\alpha_2 > 0$)

Nilai signifikansi parameter variabel investasi yang dihasilkan dalam analisis adalah 0,170 yang berarti lebih besar daripada nilai $\alpha = 0,05$. Sehingga menolak H_a dan menerima H_o . Sehingga dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel produk domestik regional bruto pada taraf kepercayaan 95 %.

5.1.2.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F statistik merupakan uji ketepatan model atau yang biasa kita kenal dengan *goodness of fit* dibawah hipotesis H_o : semua parameter yang kita duga adalah nol (namun tidak melibatkan konstanta). Nilai F statistik yang besar lebih baik dibandingkan dengan nilai F statistik yang rendah. Sedangkan nilai probabilitas F merupakan tingkat signifikan marjinal dari F statistik. Dengan nilai probabilitas F maka kita dapat melakukan penolakan hipotesis H_o jika nilai probabilitas F kurang dari nilai α . Nilai α yang digunakan disini adalah 5 %. Dari hasil regresi pada tabel 5.5 memperlihatkan bahwa nilai probabilitas F statistik adalah 0,0000 yang berarti jauh dibawah nilai α . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel belanja rutin, belanja pembangunan, investasi swasta dan angkatan kerja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel Produk Domestik Regional Bruto.

5.1.2.3 Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R^2 mengukur tingkat keberhasilan model yang digunakan dalam memprediksi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Berdasarkan Tabel 5.5 terlihat bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,967 artinya bahwa 96,7 % variasi variabel Produk Domestik Regional Bruto dapat dijelaskan oleh variabel belanja rutin, belanja pembangunan, investasi swasta dan angkatan kerja. Sedangkan sisanya sebesar 3,3 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

5.2 Analisis Ekonomi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pengkajian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah , investasi swasta dan angkatan kerja di Kota Semarang terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang secara kuantitatif telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan model persamaan regresi.

Besaran koefisien pada masing-masing variabel independen menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Besaran yang terbesar ternyata ditunjukkan oleh variabel investasi swasta, yang kemudian secara berurutan diikuti oleh variabel angkatan kerja, belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah.

Secara lebih konkret analisis terhadap arti secara ekonomi dari model penelitian :

$$LYn_t = \alpha_0 + \alpha_1 LG_t + \alpha_2 LIG_t + \alpha_3 LIP_t + \alpha_4 LL_t + \mu_t \dots \dots \dots (5.5)$$

$$LYn_t = 11,154 + 0,156 Blnj\ Rutin + 0,147 Blnj\ Pemb + 0,359 Investasi + 0,176 Angk Kerja + \mu_t \dots \dots \dots (5.6)$$

di mana untuk variabel Belanja Rutin (α_1), Belanja Pembangunan (α_2), Investasi Swasta (α_3), dan Angkatan Kerja (α_4) adalah sebagai berikut :

1. α_1 ; menunjukkan besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh perilaku variabel belanja rutin terhadap PDRB Kota Semarang, Nilainya yang sebesar 0,156 berarti apabila belanja rutin meningkat sebesar 1 %, maka pertumbuhan ekonomi Kota

- Semarang yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 akan meningkat sebesar 0,156 % (ceteris paribus, variabel lain dianggap konstan).
2. α_2 ; menunjukkan besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh perilaku variabel belanja pembangunan terhadap PDRB Kota Semarang, Nilainya yang sebesar 0,147 berarti apabila belanja pembangunan meningkat sebesar 1 %, maka pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 akan meningkat sebesar 0,147 % (ceteris paribus, variabel lain dianggap konstan). Berdasarkan Uji t bahwa variabel belanja pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang namun tidak signifikan.
 3. α_3 ; menunjukkan besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh perilaku variabel Investasi swasta terhadap PDRB Kota Semarang . Nilainya yang sebesar 0,359 berarti bahwa apabila investasi swasta meningkat sebesar 1 %, maka pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 akan meningkat sebesar 0,359 % (ceteris paribus, variabel lain dianggap konstan).
 4. α_4 ; menunjukkan besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh perilaku variabel angkatan kerja terhadap PDRB Kota Semarang . Nilainya yang sebesar 0,176 berarti bahwa apabila angkatan kerja meningkat sebesar 1 %, maka pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 akan meningkat sebesar 0,176 % (ceteris paribus, variabel lain dianggap konstan). Berdasarkan Uji t bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang namun tidak signifikan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

6.1.1 Pengaruh Belanja Rutin Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kota Semarang

Perkembangan pengalokasian belanja rutin pemerintah pada tahun pengamatan menunjukkan :

1. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan pada belanja rutin pemerintah dimana termasuk di dalamnya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman, belanja pensiun, belanja lain-lain dan pengeluaran tak tersangka.
2. Jenis pengeluaran dengan angka rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi untuk belanja rutin adalah pengeluaran tak tersangka (112 %), belanja perjalanan dinas (37,9 %) dan belanja pegawai (37 %). Pertumbuhan pengeluaran tak tersangka yang cukup tinggi didorong oleh tingginya pertumbuhan pada tahun 1997, 1999 dan 2001. Penyebab dari tingginya pertumbuhan pengeluaran tak tersangka berkaitan dengan keadaan geografis Kota Semarang yang sering mengalami bencana banjir dan rob yang disebabkan oleh air pasang sehingga menimbulkan kerusakan

infrastruktur yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang itu sendiri.

3. Berdasarkan nilai rata-rata proporsi pengeluaran masing-masing jenis pengeluaran, maka tampak bahwa sebagian besar digunakan untuk belanja rutin yang proporsinya rata-rata sebesar 54,71%.
4. Tingginya penggunaan untuk belanja rutin terutama ditentukan oleh belanja pegawai yang memiliki angka rata-rata proporsi sebesar 26,65% dari total pengeluaran, belanja lain-lain rata-rata sebesar 9,04 %, dan belanja barang rata-rata sebesar 8,55 %.
5. Besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh perilaku variabel rutin terhadap PDRB Kota Semarang, Nilainya yang sebesar 0,156 berarti apabila belanja rutin meningkat sebesar 1 %, maka pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 akan meningkat sebesar 0,156 % (ceteris paribus, variabel lain dianggap konstan).
6. Analisis mengenai pengaruh belanja rutin pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini memperkuat hasil-hasil penelitian yang telah lalu. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan pada awal penelitian telah terbukti nyata secara statistik, yaitu variabel belanja rutin pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

6.1.2 Pengaruh Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang

Perkembangan pengalokasian belanja pembangunan pemerintah pada tahun pengamatan menunjukkan :

1. Pertumbuhan untuk masing-masing jenis pengeluaran dari tahun ke tahun tampak sangat fluktuatif.
2. Untuk pertumbuhan belanja pembangunan angka pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi terdapat pada sektor transportasi (110,9%), perumahan dan pemukiman (109,2%) dan keamanan dan ketertiban umum (102,6%).
3. Berdasarkan nilai rata-rata proporsi pengeluaran masing-masing jenis pengeluaran, rata-rata proporsi belanja pembangunan adalah 45,29%.
4. Penggunaan untuk belanja pembangunan sektor-sektor yang memiliki angka rata-rata proporsi tinggi adalah sektor transportasi (12,85 %.), sektor perumahan dan pemukiman (6,98 %) dan sektor aparatur, pemerintahan dan pengawasan (6,39 %).
5. Besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh perilaku variabel belanja pembangunan terhadap PDRB Kota Semarang, Nilainya yang sebesar 0,147 berarti apabila belanja pembangunan meningkat sebesar 1 %, maka pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 akan meningkat sebesar 0,147 % (ceteris paribus, variabel lain dianggap konstan).
6. Analisis mengenai pengaruh belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif namun tidak

signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel belanja pembangunan di Kota Semarang belum dapat secara maksimal mendukung pertumbuhan ekonomi daerahnya. Secara konkrit pengaruh yang positif tersebut berarti bahwa Pemerintah Kota Semarang masih perlu meningkatkan perannya sebagai institusi pemerintah yang secara tidak langsung melalui perencanaan dan kewenangannya dalam penganggaran belanja pembangunan diharapkan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

6.1.3 Pengaruh investasi swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang

1. Analisis mengenai pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, dimana hal ini memperkuat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Hipotesis yang diajukan pada awal penelitian telah terbukti nyata secara statistik, yaitu variabel investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.
3. menunjukkan besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh perilaku variabel Investasi swasta terhadap PDRB Kota Semarang . Nilainya yang sebesar 0,359 berarti bahwa apabila investasi swasta meningkat sebesar 1 %, maka pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 akan meningkat sebesar 0,359 % (ceteris paribus, variabel lain dianggap konstan). Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

6.1.4 Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang

1. Analisis mengenai pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif namun tidak signifikan.
2. Besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh perilaku variabel angkatan kerja terhadap PDRB Kota Semarang . Nilainya yang sebesar 0,176 berarti bahwa apabila angkatan kerja meningkat sebesar 1 %, maka pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 akan meningkat sebesar 0,176 % (ceteris paribus, variabel lain dianggap konstan).
3. Berdasarkan besaran yang dihasilkan oleh variabel angkatan kerja, dapat dijelaskan bahwa angkatan kerja di Kota Semarang menjadi variabel yang mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan, berdasarkan hasil pengamatan hal ini disebabkan karena angkatan kerja yang ada di Kota Semarang didominasi oleh pekerja yang tidak mempunyai tingkat keterampilan yang memadai sehingga meskipun jumlahnya banyak namun kurang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Pengambil Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah .

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka disarankan bagi pengambil kebijakan pembangunan ekonomi daerah :

1. Mengingat anggaran terbesar terserap pada belanja rutin pemerintah di pos belanja pegawai, maka diharapkan kepada seluruh aparatur pemerintah Kota Semarang untuk dapat lebih mengoptimalkan hasil. Disamping hal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi serta tindak lanjut secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap sistem, tatakerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan pelatihan serta memberikan ketrampilan kepada aparat pemerintah Kota Semarang dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan dana-dana publik, diharapkan agar secara nyata dapat meningkatkan produktivitas daerah.
3. Masih perlunya peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah meskipun terdapat kendala adanya keterbatasan pemerintah dalam hal penyediaan dana pembangunan. Sehingga upaya efisiensi harus selalu dilakukan, agar pengaruh yang mampu diberikan makin besar dan dapat menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonominya.
4. Pemerintah daerah dapat menentukan pilihan kebijakan yang merangsang peningkatan investasi swasta di daerahnya, misal dengan meningkatkan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar dalam

menawarkan paket-paket investasi, aktif melakukan ekspose mengenai potensi daerah pada setiap kesempatan.

5. Pemerintah daerah juga perlu lebih meningkatkan produktivitas investasi publik melalui jenis investasi yang mempunyai pengembalian bersih terbesar dan bersifat komplementer terhadap investasi swasta, dengan cara menggunakan teknik-teknik perhitungan yang lazim digunakan dalam perhitungan evaluasi proyek namun dengan menambahkan biaya-biaya serta manfaat-manfaat sosial.
6. Pemerintah Kota Semarang hendaknya dapat memperhatikan faktor *amenities* (kenyamanan) fasilitas-fasilitas pendukung investasi.
7. Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat melakukan prioritas anggaran pembelanjaan pembangunan infrastruktur yang dapat menumbuhkembangkan perkembangan ekonomi yang ada.
8. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah membuat keadaan yang dapat meningkatkan investasi melalui kebijakan-kebijakan yang mempermudah masuknya investasi di Kota Semarang. Kebijakan ini dapat ditempuh misalnya dengan program perijinan investasi satu atap dan menghilangkan pungutan liar agar industri dapat kompetitif, serta memberikan insentif yang memungkinkan untuk menarik investasi ke Kota Semarang.

6.2.1 Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Ekonomi.

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan literatur bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh dari pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah baik pada tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi.

Keterbatasan jumlah variabel yang ada pada penelitian ini hendaknya juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menambahkan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti variabel yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dengan harapan dapat lebih memperkaya isi dan cakupan penelitian. Dalam hal metodologi penelitian yang digunakan, maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan data kerat lintang (*cross section*) dengan membandingkan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hadiono, 2001, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*, Tesis S2 MEP UGM Yogyakarta Tidak dipublikasikan).
- Aschauer, DA, 1989, *Public Investment and Productivity Growth in The Group of Seven, Economic Perspective*, 13
- Badan Pusat Statistik, 2003, *Kota Semarang Dalam Angka Tahun*, (berbagai tahun penerbitan, BPS Kota Semarang.
- Bird, Richard M and Varllancourt, Francouis, 1998, *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press, UK
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomis seri sinopsis*, Edisi Pertama, Cetakan keenam, BPFE, Yogyakarta.
- Davey, K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, terjemahan, UI-Press.
- Djojohadikusuma S, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Edy Suandi Hamid, 1999, Peran dan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Vol. XLXV No. 8
- Gujarati, D.1999. *Essential of Econometrics*, McGraw-Hill.Inc. Second Edition, London.

- Glasson, J, 1997, *An Introduction to Regional Planning*, London Hutchinson Educational
- Herlambang, T., Sugiarto, Bastoro dan Said K, 2001. *Ekonomi Makro ; Teori Analisis dan Kebijakan*, Gramedia, Jakarta.
- Hyman, David N, 1996, *Public Finance : A Contemporary Application of Theory to Policy*, The Dryden Press, Harcourt Brace College, Publisher.
- Ida Bagus Raka Surya Atmaja, 2001, Peranan Investasi Swasta, Investasi Sektor publik dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan GDP di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 15, No.2
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Widayat, Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto, Budi Purnomo, 1994. “*Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD*”, Laporan hasil penelitian KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
- Ira Setiati, 1996, Pengaruh Penggunaan Variabel Demografi dalam Model Pertumbuhan Ekonomi : Kasus 25 Propinsi di Indonesia, 1983-1992, *Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. XLIX No.2.
- Jhingan, ML, 1999, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, diterjemahkan oleh D.Guritno, Edisi ke Tujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jones, BM, 1996, *Local Government Financial Management*, Hertfordshire : ICSA Publishing.

- Kaldor, N, 1970, *The Case for Regional Policies*, Scottish Journal of Political Economy, No. 17
- Kim, Sung Tai. 1997. "The Role of Local Public Sectors in Regional Growth in Korea", *Asian Economic Journal*, Vol. 11 No. 21, 155-168.
- Kuznet, S, 1955, *Economic Growth and Inequalities*, American Economic Review
- Lee, Robert D and Ronald W Johnson, 1998, *Public Budgeting System 6th Edition*. AN Asper Publication Gaitherring Maryland.
- Lewis, J.W, 1969, *The Social Limits of Political Charge dalam Modernization by Design*, CH. Morse, e.a, Cornell University Press
- Lincoln Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik*, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
- Mankiw, N Gregory, 1997, *Macroeconomics*, Worth Publisher Inc, New York.
- Mc Cawley, Peter & Booth, Anne, 1982, *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta LP3ES
- Mc Kee D, Dean, Robert D, and Leahly, William H, 1970, *Regional Economics : Theory and Practice*, New York, PP 93-103
- Miller, Stephen M and Frank Russek S. 1997. Fiscal Structure and Economic Growth at the State and Local Level, *Public Finance Review*, Vol. 25 No. 3, 213-237.

- Mudradjad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta, YKPN
- Mulyono, 1999, *Pengaruh Dana Pembangunan APBD tingkat I terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah*, Tesis S2 MEP UGM Yogyakarta (Tidak di publikasikan).
- Musgrave, Richard A and Peggy B. Musgrave, 1989, *Public Finance in Theory and Practice*, Mc Graw-Hill
- Myrdal, G, 1957, *Economic Theory and Underdevelopment Regions*, London
- Neni Pancawati, 2000, Pengaruh Rasio Kapital Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan GDP di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 15, No. 2
- Nicholson, W, 1994. *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya*, Rajawali Pers.
- Nopirin, 1999. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, BPFE, Yogyakarta.
- Nurmanaf, A.R. 1999. Kesenjangan Pengeluaran Pembangunan antar Wilayah dan Propinsi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Vol XLVII, Nomor 4, 58-62
- Prasetyo Soepono, 2001, Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor) : Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 16, No.1

- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Sadono Sukirno, 2000, *Makroekonomi Modern*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Samuelson, P.A, dan Nordhaus, W, D, 1996. *Makro Ekonomi*, Edisi keempatbelas, alih bahasa Haris Munandar dkk, Erlangga, Jakarta.
- Simandjuntak, DJ Isman, S, 1985, *Persoalan Pokok Sehubungan dengan Hutang Luar Negeri Indonesia*, Seminar di UAJ Yogyakarta
- Singgih Santoso, 2000, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Elex Media Komputindo
- Siti Aisyah T Rahayu, 2000, *Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*, Tesis MEP UGM Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
- Sukanto Reksohadiprodjo, 2001, *Kemampuan Aparatur Daerah :Kunci Utama*, Prisma No.12
- Reksoprayitno, Soediyono, 1997. *Ekonomi Makro : Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Edisi Kelima, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus T.H, 2001, *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta, Ghalia, Indonesia.

Todaro, M.P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terjemahan, cetakan keempat, Jakarta, Ghalia, Indonesia.